

BAB II

INDIKATOR-INDIKATOR YANG MENUNJUKKAN ADANYA PERTENTANGAN AGAMA ISLAM DAN KRISTEN DI INDONESIA

Telah dikemukakan pada Bab I, mengenai masuknya Islam ke Indonesia pada “Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia” di Medan, menghasilkan sedikitnya enam kesimpulan. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi langsung dari Arab secara damai tanpa kekerasan. Damai dalam arti Islam tidak disiarkan dengan perang dan tidak menimbulkan guncangan-guncangan.¹

Di tengah-tengah proses transformasi sosial yang damai itu, datanglah pedagang-pedagang Barat, yaitu Portugis, kemudian Spanyol, disusul Belanda dan Inggris.² Berbeda dengan watak pedagang-pedagang Timur Tengah yang beragama Islam, pedagang Barat yang beragama Kristen menggunakan kekerasan, terutama dengan teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul. Tujuannya adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam. Selain membawa nafsu kolonialisme di bidang ekonomi-politik, mereka juga membawa kegiatan Kristenisasi.³

¹ Sjamsudduha, *Penyebaran dan Perkembangan Islam, Katolik, dan Protestan di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), hlm. 99. Lihat juga Musyrifah Sunarto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 8-9.

² Ajid Thohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 296-297.

³ Musyrifah Sunarto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

Setelah terjadi peralihan kekuasaan dari Portugis ke tangan Belanda, maka kegiatan Kristenisasi kemudian dilaksanakan Belanda, di mana pada tahap pertama dibantu oleh VOC. Selama VOC berkuasa (1602 – 1799), telah dikirim 254 orang pendeta, 800 orang penghibur orang sakit. Seluruh pekerjaan dalam gereja serta sekolah menjadi tanggung jawabnya, termasuk pembangunan gereja, serta penerbitan yang diperlukan. Sebagai akibatnya, Belanda mendirikan Gereja Negara untuk membantu tugas-tugas penjajahan, bahkan meluas sampai kepada penduduk di daerah-daerah yang dijajah. Pemerintah mewajibkan serta memberantas semua penyembahan berhala dan agama palsu serta meng-Kristenkan rakyat yang ditaklukkan. Melalui Kristenisasi, Belanda dapat menaklukkan banyak rakyat. Penaklukan suatu daerah selalu diikuti pembaptisan⁴.

Setelah lebih dari tiga setengah abad, sejak abad ke-16 hingga abad ke-20, bangsa Indonesia akhirnya lepas dari kolonialisme Barat yang beragama Kristen, dan berhasil memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada dekade awal kemerdekaan, hubungan keberagamaan antara Kristen dan Islam diliputi berbagai peristiwa yang menimbulkan pertentangan.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, terjadi peristiwa yang disebut M. Natsir sebagai, “Peristiwa ultimatum terhadap Republik Indonesia yang baru saja diproklamkan itu”. Wakil-wakil umat Kristen di Indonesia Bagian Timur tidak setuju terhadap pencantuman tujuh kata “... *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” dalam Mukaddimah UUD 1945, sebelumnya hal tersebut telah dicapai kata mufakat oleh BPUPKI. Mereka lebih

⁴ Muller Kruger, *Sejarah Gereja di Indonesia* (Jakarta : Penerbit Badan Penerbit Kristen, 1966), hlm. 31.

baik memilih berada di luar Republik apabila keinginan mereka tidak terpenuhi. Akhirnya Mukaddimah UUD 1945 mengalami perubahan. Di bidang legislatif, pihak Kristen berusaha keras untuk menggagalkan setiap usaha pengesahan undang-undang yang diinginkan umat Islam. Mereka tidak akan mentolelir setiap peraturan yang mendapatkan kesempatan bagi umat Islam untuk mengatur kehidupan mereka lebih serasi dengan ajaran Islam.⁵

Kegiatan-kegiatan umat Kristen di Indonesia sering menimbulkan pertentangan dengan pemeluk agama lain, dalam hal ini Islam. Berikut ini akan dipaparkan berbagai indikator yang menunjukkan adanya pertentangan antara umat Islam dan Kristen yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia sejak tahun 1963 hingga tahun 1970.

A. Konferensi Umat Kristen Protestan dan Katolik di Surabaya

Ketika satu dasawarsa lebih setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1963, umat Kristen, Katholik dan Protestan dalam Konferensinya di Surabaya, telah merencanakan gerakan Kristenisasi untuk meng-Kristenkan pulau Jawa dalam jangka waktu 20 tahun, dan Indonesia 50 tahun, melalui 10 program.

- 1) Memperbanyak sekolah Kristen.
- 2) Sekolah-sekolah menengah/ tinggi hanya menerima murid-murid Kristen.
- 3) Membuka Madrasah Al Kitab di kota-kota yang kuat Islamnya.
- 4) Pria Kristen supaya mengawini pemudi Islam.
- 5) Gadis-gadis Kristen yang kuat imannya mengawini pemuda-pemuda Islam yang lemah imannya.

⁵ Lihat Mohammad Natsir, "Tanpa Toleransi Tak-kan Ada Kerukunan", dalam Lukman Hakiem, *Fakta dan Data Usaha-Usaha Kristenisasi di Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1991), hlm. 45-46.

- 6) Terhadap Islam keturunan (terdapat liar) tarik anak-anaknya ke sekolah Kristen, beri pertolongan secukupnya pada klinik (rumah sakit, rumah yatim Kristen).
- 7) Terhadap Islam taqlid, yang fahamnya ke-Arab-Araban, cetak Injil sebanyak-banyaknya dalam bahasa Arab.
- 8) Terhadap Islam politik, beri pangkat dan uang.
- 9) Terhadap Islam nekat yang tidak berfaham Muhammadiyah dan Persis, dirikan Gereja sebanyak-banyaknya dekat Masjid-Masjid.
- 10) Diusahakan supaya menerima atau mengadakan peraturan, yang melarang (menolak) murid-murid Kristen mengharuskan ke sekolah Pemerintah.⁶

Setahun kemudian, para tokoh Kristen Indonesia masa itu, W. B. Sijabat, T.B. Simatupang, A.N. Rajawane, menerbitkan sebuah buku yang berjudul *"Panggilan Kita di Indonesia Dewasa Ini"*, yang memuat tuntunan pelaksanaan Kristenisasi di Indonesia.⁷

Pendeta Rifa'i Burhanuddin dari gereja Advent Hari Ketujuh Bandung telah menulis buku *"Penuntun Mengabarkan Injil kepada Ummat Islam"*. Pendeta Dr. J. Verkuyl menulis buletin yang telah diterbitkan oleh Lembaga Penyelidikan Pekabaran Injil dari DGI yang berjudul *"Interpretasi Iman Kristen kepada Orang Islam"*. Kedua buku tersebut dimaksudkan untuk menjadi bahan pegangan bagi para Pendeta dan kaum Kristen untuk menarik umat Islam kepada agama Kristen.⁸

Kemudian untuk menjawab tantangan dari keputusan konferensi tersebut di atas, Muhammadiyah telah menggariskan, untuk mempertajam kewaspadaan Islam, dengan jalan:

⁶ Agussalim Sitompul, *Interaksi Muhammadiyah dengan Kekuatan Sosial Politik dan Sosial Budaya Tahun 1950-1965* (Yogyakarta: tanpa penerbit, 1990), hlm. 47.

⁷ *Harian Mercuri Suar*, Jakarta, 30 Oktober 1967, hlm. II.

⁸ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama* (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), hlm. 280.

- 1) Memperbanyak sekolah-sekolah dan pengajian-pengajian Islam.
- 2) Membuka Madrasah Agama di kota-kota besar.
- 3) Mendirikan dan memakmurkan Masjid-Masjid dan langgar.
- 4) Menggiatkan penyebaran agama Islam sampai ke tempat-tempat yang belum ada agama Islam.
- 5) Memperluas dan memperdalam ajaran Tauhid.
- 6) Membentuk badan-badan penyiaran Islam sebanyak-banyaknya.⁹

B. Peristiwa di Flores Timur¹⁰

Pada tanggal 20 April 1966, delapan orang pemuka Islam Witihamia dipanggil untuk menghadap ke sebuah markas di Waiwerang, Flores Timur, terletak 15 kilometer dari desa Witihamia di mana kedelapan orang tersebut tinggal. Panggilan itu dilakukan dengan surat dan disampaikan melalui para Ketua Adat.

Begitu mereka sampai di tempat, tanpa alasan dan sebab, mereka langsung disergap, kemudian disiksa dan dibunuh. Peristiwa pembunuhan ini dilakukan oleh para oknum anggota Komando Operasi Penertiban (KOMOP), yang didalangi oleh seorang Pastur Katholik asal Belanda bernama Van der Hulst.

Keterangan lebih jelas mengenai pembunuhan itu sulit sekali didapatkan, karena masyarakat ditakut-takuti dengan berbagai ancaman. Peristiwa itu berasal dari suatu fitnah yang direncanakan. Tanpa alasan yang jelas, Witihamia dianggap sebagai tempat orang-orang jahat. Perbuatan itu dimaksudkan untuk menghancurkan mental dan moral umat Islam hingga di

⁹ Agussalim Sitompul, *op.cit.*, hlm. 47-48.

¹⁰ Dirangkum dari *Harian Mercuri Suar*, 17-21 Oktober 1967.

antara mereka ada yang terpaksa meninggalkan Islam, demi keselamatan jiwanya.

C. Pendirian Gereja di Meulaboh Aceh Barat

Peristiwa ini terjadi bulan Juli 1967, di sebuah perkampungan Muslim di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Seluruhnya penduduknya beragama Islam, tidak ada pemeluk agama Kristen. Akan tetapi, tanpa diduga ada yang hendak berusaha mendirikan sebuah gereja. Kejadian tersebut tentu mendapat reaksi dari umat Islam setempat. Majelis Ulama Kabupaten Aceh Barat berkeberatan terhadap pendirian gereja tersebut. Diminta kepada Pemerintah Daerah setempat agar gereja yang sedang dan akan dibangun di Aceh, khususnya di daerah Meulaboh dan sekitarnya ditutup dan dihentikan pembangunannya.¹¹

Umat Islam hanya memprotes dan menyatakan keberatannya. Tetapi isu yang berkembang ketika itu, mengatakan bahwa gereja di Meulaboh telah dibakar. Secara tegas Gubernur Aceh saat itu, Kol. Hasbi Wahidi membantahnya.¹²

Peristiwa ini mencuat hingga ke lingkungan DPRGR. J.C.T. Simorangkir dan kawan-kawannya dari golongan Protestan dan Katholik mengajukan interpelasi dan menyatakan pendapatnya bahwa cara yang

¹¹ Umar Hasyim, *op.cit.*, hlm. 291.

¹² *Ibid.*, hlm. 292.

dilakukan orang di Aceh Barat itu, meragukan kemurnian pelaksanaan Pancasila.¹³

Menteri Agama (saat itu), Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, menjelaskan bahwa, dalam mengambil kebijaksanaan yang menyangkut kerukunan hidup umat beragama, pemerintah bukan saja mendasarkan kebijaksanaannya atas asas-asas yang formal dan idealistis, tetapi juga mendasarkan pada kondisi situasi setempat, pada aspirasi keagamaan yang sehat, dan pada faktor-faktor sosial psikologis dalam rangka memelihara toleransi hidup umat beragama yang tidak berat sebelah dan pincang.¹⁴

Sehubungan dengan kasus ini, kemudian Drs. Lukman Harun, anggota DPRGR yang didukung oleh fraksi-fraksi Islam, mengajukan usulan interpelasi kepada pemerintah tentang bantuan-bantuan asing yang diterima oleh agama-agama di Indonesia.¹⁵ Menurut Lukman, apa yang dicapai umat Kristen adalah di luar kemampuan sosial ekonomi mereka. Jadi mestinya mereka telah bekerja dengan bantuan luar negeri. Sebagai contoh mengenai perkembangan pembangunan gereja-gereja, sekolah-sekolah, dan rumah sakit Kristen di seluruh tanah air. Bantuan asing yang demikian banyak tersebut tentu ada yang legal dan ilegal. Oleh karena itu, bantuan demikian harus ditertibkan dan disalurkan lewat pemerintah.¹⁶

Kemudian, kurang lebih satu tahun pemerintah memberikan jawaban atas usul interpelasi Lukman Harun. Pemerintah menegaskan bahwa pada

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 293.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 298.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 309.

dasarnya pemerintah tidak berkeberatan terhadap kerja sama dan bantuan untuk agama-agama dan badan-badan keagamaan di Indonesia dari luar negeri, karena semua agama bersifat universal yang tidak mengenal perbedaan bangsa, warna kulit, suku, golongan dan sebagainya. Tentang berapa jumlah bantuan atau berapa jumlah propagandis-propagandis agama asing, pemerintah menjawab bahwa belum ada data, belum mengetahui.¹⁷

D. Peristiwa di Makassar Sulawesi Selatan

Masih hangat dalam ingatan orang ketika itu tentang peristiwa di Meulaboh, tiba-tiba masyarakat dikejutkan peristiwa yang terjadi di Makassar tanggal 1 Oktober 1967. Sebuah gereja dilempari batu-batu. Kejadian ini berawal dari penghinaan seorang Pendeta Kristen Protestan kepada Nabi Muhammad SAW, di hadapan murid-murid yang beragama Islam di sebuah sekolahan.¹⁸

Peristiwa ini sebenarnya tidak akan terjadi jika Pendeta itu mau meminta maaf sebagaimana yang diminta umat Islam yang telah mendatangi rumahnya hingga dua kali sebelum tanggal 1 Oktober. Pendeta itu minta maaf sesudah peristiwa terjadi. Permintaan maaf itu pun setelah didesak oleh para pembesar gereja lainnya. Entah apa yang terjadi bila tidak ada desakan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 327.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 314.

tersebut.¹⁹ Menurut Natsir, tindakan pengrusakan gereja itu tidak baik, akan tetapi kejadian itu merupakan satu ekses.²⁰

E. Musyawarah Antar Agama di Jakarta

Pada tahun 1967, misi Kristen menunjukkan cara-cara yang sangat menyinggung perasaan umat Islam, yaitu mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen di lingkungan kaum Muslimin tanpa izin pemerintah daerah setempat. Keadaan yang demikian, telah menimbulkan suatu peristiwa yang tidak diinginkan, yaitu perusakan gereja di Meulaboh dan Makassar, seperti yang telah diuraikan di atas.²¹

Peristiwa tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dan kelanjutan. Menteri Agama K.H.M. Dahlan yang ketika itu baru dilantik, berinisiatif menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama di Indonesia.²² Tujuan pemerintah mengadakan musyawarah antara lain untuk menghilangkan pertentangan, salah pengertian, khususnya antara umat Islam dan Kristen,²³ serta dalam rangka menjaga keserasian dalam pelaksanaan penyebaran agama di Indonesia.²⁴

Tepat dua bulan setelah terjadinya peristiwa Makassar itu, pada tgl. 30 November 1967, diadakanlah Musyawarah Antar Agama, tiga hari menjelang bulan Ramadhan. Musyawarah itu bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 314-315.

²⁰ Mohammad Natsir, *Islam dan Kristen di Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1969), hlm. 208.

²¹ *Ibid.*, hlm. 207.

²² *Mercu Suar*, 19 Oktober 1967, hlm. I.

²³ *Musyawarah Antar Agama* (Yogyakarta: Sumbangsih, t.t.), hlm. 6.

²⁴ Mohammad Natsir, *op.cit.*

Agung Jakarta. Acara itu dihadiri Presiden Soeharto, serta pemuka-pemuka seluruh agama yang diakui resmi oleh pemerintah, yakni tokoh-tokoh dari Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu Bali, dan Buddha, para Ulama, Pendeta, Pastor, Pedhanda dan Bikhshu, juga dari tokoh-tokoh partai politik yang berdasarkan agama.²⁵

Dalam musyawarah itu Pemerintah mempunyai dua gagasan yang disampaikan oleh Jenderal Soeharto, Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Rakyat (Dr. Idham Khalid), dan Menteri Agama (K.H.M. Dachlan), yakni:

1. Agar dibentuk Badan Kontak Antar Agama.
2. Agar supaya dibuat satu Piagam yang ditandatangani bersama, yang isinya menerima anjuran Presiden yakni agar pemeluk suatu agama yang telah ada janganlah dijadikan sasaran propaganda oleh agama lain.²⁶

Golongan Kristen tidak dapat menyetujui salah satu isi Piagam, yakni tidak menjadikan umat yang beragama sebagai sasaran penyebaran agama masing-masing. Musyawarah hanya menghasilkan sebuah Pengumuman Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto, yang menyatakan bahwa pemerintah menghargai usaha-usaha yang telah dilakukan para peserta musyawarah, sehingga musyawarah dapat berjalan dengan semestinya. Pemerintah akan menjamin toleransi hidup umat beragama. Menteri Agama hanya mengumumkan bahwa telah disepakati bersama dibentuknya suatu Badan Konsultasi Antar Agama yang membantu Pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan umat beragama.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm. 329.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 330.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 332-333.

Musyawarah tersebut gagal, karena Piagam tidak jadi ditandatangani. Maksud pemerintah tidak tercapai, dan Presiden tidak jadi datang untuk menutup upacara.²⁸

F. Peristiwa di Slipi Jakarta

Peristiwa ini terjadi pada bulan April 1969, di Kelurahan Palmerah Slipi Jakarta Barat. Ketika itu, satu delegasi rakyat Slipi yang terdiri dari wakil-wakil Pemuda, Ormas dan Organisasi Politik telah menyampaikan keberatan atas pendirian gereja kepada Lurah, Camat, dan Koramil Grogol Petamburan, Walikota Jakarta Barat, dan Komando Distrik Militer setempat. Ternyata gereja Slipi itu dibangun tanpa izin dari Gubernur DKI Jaya. Pembangunan gereja itu kemudian diperintahkan untuk dihentikan oleh Walikota Jakarta Barat dan Koramil setempat, tetapi pihak gereja tidak mengacuhkan perintah Walikota dan Koramil itu. Kemudian terjadilah peristiwa Slipi, masyarakat beramai-ramai berdemonstrasi supaya dihentikan pembangunan gereja tersebut.²⁹ Padahal ketika itu dari total 36.000 jiwa. Penduduk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik hanya 350 jiwa, dan telah memiliki 5 buah gereja.³⁰

Apabila terjadi hal semacam itu maka umat Islam akan dihindangi oleh *feel of powerlessness* – suatu perasaan tidak berdaya –, seolah-olah tidak ada perlindungan dan jaminan hukum terhadap kepentingan (keyakinan) mereka dari pelanggaran golongan lain. Natsir mengakui, bahwa tindakan fisik itu

²⁸ *Ibid.*, hlm. 333.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 322.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 321.

melanggar hukum. Akan tetapi, pelanggaran hukum itu tidak akan terjadi sekiranya tidak terjadi pula pelanggaran hukum terhadap Pemerintah setempat oleh pihak Kristen. Natsir menyesalkan akan sikap pemerintah yang baru bertindak setelah terjadi insiden, bukannya bertindak sebelumnya.³¹

G. Peristiwa di Bima Sumbawa Timur

Awalnya di desa Donggo, Kabupaten Bima, Sumbawa Timur terjadi peristiwa pelemparan batu ke sebuah atap masjid. Peristiwa ini tidak dapat diketahui langsung siapa pelakunya. Pelemparan itu terjadi setelah pukul 22.00. Pada malam ketiga pelaku tertangkap basah. Ia mengaku bahwa perbuatannya dilakukan demi untuk melaksanakan perintah suci untuk mendirikan Kerajaan Suci Yesus. Ia diberi nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.³²

Perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Willian Carey bahwa “Yesus Kristus mempunyai kerajaan yang harus diproklamirkan dalam kekuatannya ke segala pelosok dunia. Kewajiban bagi orang Kristen, untuk memproklamirkan kerajaan tersebut.”³³

Beberapa hari kemudian terjadi peristiwa lagi. Di saat umat Islam datang ke masjid untuk menjalankan shalat subuh, tiba-tiba di masjid terdapat berpuluh-puluh kaki, kepala, dan daging babi yang digantungkan. Walaupun mendapat hinaan dan tindakan biadab, umat Islam tidak melakukan reaksi apa-

³¹ Mohammad Natsir, *op.cit.*, hlm. 239.

³² Umar Hasyim, *op.cit.*, hlm. 326.

³³ *Ibid.*, hlm. 287.

apa terhadap peristiwa tersebut.³⁴

Setelah beberapa peristiwa sebelumnya dibiarkan, maka terjadilah peristiwa lagi. Pada suatu hari bedug masjid Donggo dirusak/ dirobek umat Katholik dan menggoreskan gambar salib di bedug itu.³⁵

Karena berbagai pancingan dari peristiwa tersebut, maka muncul kemudian reaksi atas kejadian yang dialami umat Islam, yakni pengrusakan sebuah gereja yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 1969. Dengan demikian, peristiwa tersebut terjadi karena diakibatkan perbuatan penghinaan terhadap umat Islam oleh kaum Katholik.³⁶

H. Kegiatan Missi Baptis di Sumatra Barat

Melalui surat pengantar dari *The Foreign Mission Board of the Southern Baptist Convention* tanggal 11 April 1963 kepada pemerintah setempat, telah datang ke Bukittinggi dr. F. B. Owen, seorang berkewarganegaraan Amerika Serikat dalam tugasnya sebagai dokter dan pengabar Injil. Kemudian kedatangannya disusul oleh Ross. B. Fryer yang bertindak sebagai Pendeta Baptis.

Segera setibanya di Bukittinggi, usaha pertama yang dilakukannya mencari sebidang tanah untuk tempat mendirikan kompleks Rumah Sakit. Owen mendapat tawaran sebidang tanah di Ateh Tambuo sebelah Timur Kota Bukittinggi. Reaksi muncul dari ninik-mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan pemilik-pemilik tanah setempat, dengan keluarnya pernyataan bersama yang

³⁴ *Ibid.*, hlm. 326.

³⁵ *Ibid.*.

³⁶ Umar Hasyim, *op.cit.*, hlm. 326.

menyatakan tidak dapat menyetujui penjualan/ pemakaian tanah tersebut untuk keperluan agama asing (Kristen).

Setelah berkali-kali gagal, akhirnya Missi Baptis berhasil memperoleh sebidang tanah militer di kompleks Asrama Batalyon Infanteri 132 Bima Sakti. Missi Baptis memberikan uang sumbangan sebesar 20.000 dollar AS kepada Korem 032/ Wirabraja.

Pada tanggal 25 Februari 1969, DPRGR Sumatra Barat, memutuskan karena sulitnya memperoleh kata sepakat dalam masalah Missi Baptis ini, menyerahkan keputusannya kepada Gubernur/ Kepala Daerah Sumatra Barat. Berkenaan dengan keputusan DPRGR ini, Majelis Ulama Sumatra Barat dengan surat tanggal 1 April 1969, menyampaikan kepada Gubernur/ Kepala Daerah Sumatra Barat, untuk memelihara ketenangan masyarakat terutama ketenangan umat beragama, mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan kehendak hati nurani umat Islam di daerah tersebut.

Kemudian pada tanggal 8 Desember 1969, Gubernur Sumatra Barat Harun Zain, melalui Surat Keputusan Nomor: 114/ GSB/ 1969, mengizinkan pendirian sebuah Rumah Sakit kepada Yayasan Baptis Indonesia Cabang Bukittinggi yang bertempat di dalam kompleks Asrama Batalyon Infanteri 132/ Bima Sakti Korem 032/ Wirabraja Kodam III/ 17 Agustus.

Seperti diketahui bahwa dr. F. B. Owen adalah dokter dan pengabar Injil, dan dalam Anggaran Dasar Yayasan Baptis pasal 2 dan 3 yang menjelaskan maksud, tujuan, dan usaha Yayasan, serta wawancara Owen dalam majalah *Selecta* No. 324 tanggal 4 Desember 1967, yang menegaskan

bahwa Owen dengan Yayasan Baptisnya, adalah bekerja semata-mata untuk kepentingan agamanya, maka dari itu Yayasan Baptis tidak terlepas dari Pengabaran Injil di daerah Sumatra Barat.³⁷

Umat Islam Sumatera Barat pun gelisah, dan Ketua Majelis Ulama Sumatera Barat, H. Mansur Daud Datuk Palimo Kayo menanggapi keputusan Gubernur itu sebagai hal yang tidak masuk akal. Pendirian Rumah Sakit Baptis di tengah-tengah umat Islam adalah suatu “kebijaksanaan yang tidak bijaksana”, dan suatu sikap tidak toleran dari umat Kristen. Tindakan itu tidak memperhatikan aspirasi umat Islam yang penduduknya hampir dikatakan mutlak beragama Islam. Dalam sidang DPRD Sumatra Barat, Ir. Sofyan Asnawi menegaskan hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Penyebaran Agama.³⁸

I. Tarakanita Affair di Jakarta³⁹

Di sebuah desa yang terletak di Grogol Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan dibangun sebuah Gedung Sekolah Dasar Katholik Tarakanita III. Letak bangunan tersebut berada di tengah-tengah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Jarak bangunan dengan tempat kegiatan umat Islam seperti mushola, masjid, dan madrasah hanya puluhan meter.

Bangunan tersebut ternyata bangunan liar yang belum mendapat izin dari pemerintah setempat. Penduduk setempat, pihak Kecamatan, Dinas

³⁷ Disimpulkan dari *Dokumentasi tentang Kegiatan Missi Baptis di Sumatra Barat dari 1 April 1963 s/d 27 Januari 1970*, yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Sumatra Barat.

³⁸ Umar Hasyim, *op.cit.*, hlm. 324.

³⁹ Disimpulkan dari *Tarakanita Affair*, yang diterbitkan oleh Masyarakat Islam Grogol Utara Ormas/Orpol Islam Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Pekerjaan Umum, serta Ormas dan Orpol Islam memberikan peringatan berkali-kali kepada pihak Tarakanita. Hal tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh mereka.

Kesabaran masyarakat tidak dapat dikendalikan, dan akhirnya selepas shalat Jumat pada tanggal 23 Januari 1970 meletuslah spontanitas masyarakat untuk membongkar bangunan tersebut.

Akhirnya pada waktu itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Raya Laksamana Muda Udara Wiriadinata menyatakan bahwa, SD Tarakanita akan diambil alih oleh pihak Pemerintah DKI Jakarta Raya.

J. Program Kristenisasi Umat Katholik se-Jawa Tengah

Seperti yang telah diuraikan di atas, pada tahun 1963 melalui Konferensinya di Surabaya umat Kristen Katholik dan Protestan mempunyai rencana gerakan Kristenisasi untuk meng-Kristenkan pulau Jawa dengan waktu 20 tahun, dan Indonesia 50 tahun.

Kemudian, peristiwa serupa muncul dan terulang kembali. Melalui sidang kerjanya di Magelang pada tanggal 20 Juli 1970, umat Kristen Katholik se-Jawa Tengah menetapkan sebuah program Kristenisasi. Berikut akan dipaparkan beberapa program mereka yang menyangkut umat Islam.⁴⁰

Bidang Penerangan:

1. Mengadakan latihan khotbah gereja pada para siswa rendah/ tinggi.
2. Penerangan kepada kelompok intern/ ekstern.
3. *Approuch kepada pejabat/ umat Islam.*
4. Berusaha agar para karyawan Pemerintah bisa diberikan ceramah Katholik.
5. Dakwah ke kampung-kampung.

⁴⁰ Umar Hasyim, *op.cit.*, hlm. 276-277.

6. Memperbesar Hari Natal.

Usaha lain:

1. Tiap Kabupaten harus sudah ada gereja, BKIA, Poliklinik, Sekolah-sekolah TK sampai SLTA.
2. *Diusahakan mendirikan gereja baru di dekat masjid.*
3. Tiap-tiap Kecamatan diusahakan tempat ibadah (gereja kecil), Poliklinik, SD sampai SLTA.
4. Diusahakan tiap Kabupaten harus sudah ada Badan, Yayasan Perusahaan besar/ kecil.
5. Tiap Kabupaten dalam tahun 1970 s/d 1972 harus sudah ada minimum 25 % pengikut.

Landasan dan Dasar Kerja:

1. Sebab masyarakat haus agama.
2. *Agama Islam adalah agama Nasional, tetapi masyarakat jauh dari Islam.*
3. *Umat Islam tidak bisa menjaga martabat/ kemurnian agama Islam.*
4. Banyaknya tokoh-tokoh Islam yang terlibat penyelewengan.
5. Banyaknya kaum muda ingin merebut kedudukan.
6. Banyaknya kaum tua ingin menguasai pengaruh.
7. *Mundurinya proyek/ pembangunan Islam.*
8. Generasi muda selalu dihadapkan satu tantangan.
9. Kesadaran beragama sangat kurang dimiliki perseorangan.
10. *Issue tentang modernisasi Islam.*
11. *Dekadensi moral.*
12. Timbulnya tenaga penganggur.
13. Pelajar sehabis studi.
14. *Mengaku dirinya Islam sejati.*
15. Pelajaran yang meneruskan studi.
16. *Perpecahan umat Islam tampak terang.*
17. *Jauhnya ABRI dari umat Islam.*⁴¹

Selain dari berbagai peristiwa yang diuraikan di atas, terdapat berbagai peristiwa dan kegiatan Kristenisasi lainnya yang menimbulkan ketegangan antara umat Islam dan umat Kristen di Indonesia. Misalnya, program jangka panjang Kristenisasi di Indonesia, melalui Keputusan Dewan Gereja Indonesia di Jakarta tanggal 31 September 1979.⁴² Namun, untuk membatasi permasalahan, penulis hanya mengupas peristiwa-peristiwa yang terjadi tahun 1963-1970 saja.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 277-278.

⁴² Selengkapnya dapat dilihat berbagai usaha Kristenisasi di Indonesia terbitan Majalah Media Dakwah, dalam Lukman Hakiem (ed.), *Fakta dan Data Usaha-usaha Kristenisasi di Indonesia*, (Jakarta: Majalah Media Dakwah, 1991).

Menurut H.M. Rasyidi pokok persoalan hubungan antara umat Islam dan umat Kristen di Indonesia adalah masalah adanya gerakan Kristenisasi. Sebab ketidak rukunan itu, yaitu gerakan Kristenisasi, harus dihilangkan.⁴³ Natsir juga berpendapat sama, sebab hakiki dari timbulnya pertentangan-pertentangan itu adalah usaha-usaha meng-Kristenkan orang Islam oleh golongan Kristen.⁴⁴ Menurut F. L. Cooley, sebagaimana telah dikutip Sudarto, menyatakan bahwa, dalam Kristen, penyebaran ajaran agama kepada umat yang sudah beragama Kristen adalah kebangunan rohani, sedangkan tugas missi adalah ke luar dengan sasaran umat non Kristen.⁴⁵

Dilihat dari sasaran atau objek garapan, Kristenisasi tidak hanya dilancarkan terhadap orang yang belum memeluk agama atau mereka yang memeluk animisme saja, tetapi juga ditujukan kepada orang yang telah memeluk agama, terutama Islam jika di Indonesia. Peng-Kristenan tersebut dipercaya sebagai satu tugas suci yang dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh ditinggalkan. Meng-Kristenkan orang dianggap sebagai membawa kembali anak-anak domba yang tersesat untuk dibawa kembali kepada induknya. Manusia-manusia sebagai anak domba akan dibawa kepada kerajaan Allah.⁴⁶

Menurut pandangan Mahmoud Ayoub, sebagaimana dikutip Alwi Shihab, selama ini ada tiga masalah utama yang menguasai kesadaran kaum muslimin

⁴³ H. M. Rasyidi, "Kasus RUU Perkawinan dalam Hubungan Islam dan Kristen", (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 7, dalam Hendra Tohari, "Studi Pemikiran M. Natsir tentang Sebab-Sebab Timbulnya Pertentangan Islam-Kristen di Indonesia 1965-1970", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm. 65.

⁴⁴ Mohammad Natsir, *op.cit.*, hlm. 238.

⁴⁵ Sudarto, "Konflik Islam-Kristen", (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 106, dalam Hendra Tohari, *op.cit.*, hlm. 75.

⁴⁶ Ahmad Muttaqin, "Konstruksi Media atas Wacana Kristenisasi di Indonesia", *Religi*, Vol. III, No. 1, Januari 2004, hlm. 35.

dalam konteks hubungan dan konflik Muslim-Kristen, yakni kolonialisasi, orientalisme, dan aktivitas Kristenisasi (*missionary activities*).⁴⁷ Martin Lukito Sinaga, seorang Pendeta Kristen, juga memiliki pandangan yang hampir sama. Ia mengemukakan bahwa, warisan Kristen yang diterima bagaimanapun terkait dengan “dua saudara tiri” ini: yaitu misi dan kolonialisme Barat. Kaitannya dengan hal ini, isu Kristen pada umumnya bergerak seputar penambahan jiwa, memperbanyak gereja dan ikutnya umat Kristen tadi ke dalam *social progress* dunia modern. Ditambah dengan infrastruktur modern Barat – sekolah dan rumah sakit dan terakhir media massa, maka Kekristenan jelas-jelas telah menjadi “faktor produksi” yang mapan. Belum lagi dengan bumbu militansi *personal-care* individu-individu Protestan, maka memang Kristenisasi tampak seperti arus tak terbendung.⁴⁸

Sebagaimana yang telah diungkapkan di awal, Kristenisasi adalah upaya untuk memasukan orang lain ke dalam agama Kristen (meng-Kristenkan) yang berorientasi pada kuantitas anggota atau “jiwa-jiwa yang dimenangkan”. Kristenisasi berbeda dengan misi dan zending. Misi (dari Bhs. Latin *missio*, “pengutusan”) secara umum berarti tugas atau panggilan; berhubungan dengan gereja diartikan secara luas sebagai seluruh dimensi kehadiran gereja di dunia (termasuk dimensi ke dalam gereja dan dimensi ke luar); dalam arti yang sempit dipahami sebagai upaya menyebarkan iman Kristen kepada orang-orang di luar gereja. *Missio Dei* adalah kata latin untuk “misi Allah” dan merupakan kata kunci

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Martin Lukito Sinaga, “Setelah Kristenisasi Usai: Sketsa Baru Teologi”, *Majemuk*, (Jakarta, 2003), hlm. 1, dalam <http://www.icrp-online.org>, diakses tanggal 21 Oktober 2007. Lihat juga pernyataan Martin, dalam Ahmad Muttaqin, *op.cit.*, hlm. 49.

untuk konsep misi yang dikembangkan sejak tahun 1950-an dalam gerakan Ekumenis yang menekankan misi sebagai inisiatif dan gerakan Allah Tritunggal sendiri. Misionaris adalah orang yang terlibat dalam misi, dalam pemahaman yang luas semua orang Kristen dalam melaksanakan panggilannya dan tanggung jawabnya di dunia, dalam arti yang sempit orang yang ditugaskan dan diutus secara khusus ke suatu tempat untuk memberitakan injil di sana. Zending atau Pekabaran Injil dapat dipahami secara luas sebagai semua kegiatan yang mengkomunikasikan injil (dari Bhs. Yunani *evangelion*, “kabar baik”) melalui seluruh sikap, tindakan dan kesaksian hidup kepada seluruh ciptaan; dalam arti yang sempit dipahami sebagai penyampaian verbal pesan-pesan iman Kristen, disertai pelayanan-pelayanan praktis-sosial, dengan tujuan pertobatan dan penerimaan injil oleh orang yang “diinjili” (Penginjilan sebagai upaya menanamkan injil di dalam seseorang atau sebuah masyarakat). Oleh sebagian besar Teolog, Kristenisasi dewasa ini ditolak sebagai tujuan misi/ zending.⁴⁹

Menurut Tarmizi Taher, agama sering menjadi faktor konflik apabila terjadi: (1) pendirian tempat ibadah baru tanpa melalui izin pemerintah daerah setempat; (2) penyiaran agama melalui bujukan dan rayuan bahkan paksaan (*proselytizing*) terhadap orang yang telah beragama; dan (3) pelecehan ajaran suatu agama oleh penganut agama lain.⁵⁰

Oleh karena itu, agar pertentangan agama tidak terjadi, maka regulasi khusus yang mengatur kehidupan antar umat beragama penting untuk dibuat,

⁴⁹ Lihat, <http://www.geocities.com/jurnalintim/ed6ensiklopedi.htm>, “Ensiklopedi Sederhana Istilah-istilah Misi”, diakses tanggal 29 Januari 2008.

⁵⁰ Tarmizi Taher, “Aspiring for the Middle Path of Religious Harmony in Indonesia”, (Jakarta: Censis, 1997), hlm. 17, dalam Ahmad Muttaqin, *op.cit.*, hlm. 46.

seperti penetapan kode etik penyiaran agama, pendirian tempat ibadah, penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan, peraturan dalam bidang perkawinan, bantuan dana dan tenaga keagamaan dari luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, serta lembaga resmi yang dibentuk pemerintah sebagai wadah untuk komunikasi dan bermusyawarah bagi berbagai pemeluk agama.



BAB III

BAB III

USAHA-USAHA YANG DITEMPUH PEMERINTAH UNTUK MENJAGA KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

A. Penetapan Kode Etik Penyiaran Agama dan Terbentuknya Lembaga- Lembaga Keagamaan di Indonesia

Dari berbagai peristiwa pertentangan agama yang pernah terjadi, pemerintah perlu melakukan upaya menjaga kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Pada tahun 1967 pemerintah telah melakukan upaya, dengan mengadakan Musyawarah Antar Agama, yang dihadiri Pj. Presiden Soeharto pada tanggal 30 November di Gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta. Namun, usaha tersebut gagal. Ketika itu, Menteri Agama K.H.M. Dahlan hanya mengumumkan bahwa telah disepakati bersama dibentuknya suatu Badan Konsultasi Antar Agama yang membantu Pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah agama.¹

Pj. Presiden Soeharto dalam musyawarah tersebut juga memberikan pokok-pokok pikiran yang mendasar tentang perlunya tata cara atau dapat dianggap sebagai pokok-pokok kode etik penyiaran agama, dan keharusan mematuhi ketentuan hukum dan segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Presiden mengharapkan sungguh-sungguh kiranya

¹ Umar Hasyim, *op.cit.*, hlm. 332-333.

semua pemuka agama dan masyarakat: “Benar-benar melaksanakan jiwa dan semangat toleransi yang jelas diajarkan oleh setiap agama dan Pancasila”²

Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama antara semua pimpinan/ pemuka agama-agama di Indonesia, untuk membahas masalah yang memang sangat mendasar dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Pertemuan tersebut kelak akan diikuti oleh berbagai jenis kegiatan antar umat agama; antara lain berupa: dialog, konsultasi, musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama-sama ke daerah-daerah, seminar antar cendekiawan berbagai agama, sarasehan pimpinan generasi pemuda agama, dan sebagainya.³

Pada periode Menteri Agama H. A. Mukti Ali, diselenggarakan dialog-dialog di beberapa tempat di Indonesia. Dialog-dialog itu merupakan suatu bentuk kegiatan yang diadakan sebagai proyek dari pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama. Penyelenggaraan dan pesertanya kebanyakan dari kalangan Perguruan Tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat.⁴

Pada Periode Menteri Agama berikutnya, H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, menegaskan bahwa perlu ada tiga macam kerukunan umat beragama di Indonesia, yang kemudian sering disebut sebagai “Tri Kerukunan Umat Beragama”, yaitu kerukunan intern umat beragama; kerukunan antar umat beragama; dan kerukunan umat beragama dengan Pemerintah.⁵

² Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ Umar Hasyim, *op.cit.*, hlm. 342.

⁵ *Ibid.*, hlm. 374.

Pemerintah terus mengusahakan pertemuan dan konsultasi dengan pimpinan agama-agama yang ada di Indonesia. Usaha Menteri Agama K.H.M. Dachlan untuk membentuk Badan Kontak Antar Agama diteruskan oleh Menteri-Menteri Agama berikutnya, yaitu H. A. Mukti Ali, dan H. Alamsyah Ratu Perwiranegara. Pada periode Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, Badan Kontak tersebut dapat dibentuk dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB). Badan ini terbentuk dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 35 Tahun 1980, yakni 13 tahun setelah diadakan Musyawarah Antar Agama tahun 1967.⁶ (Lihat **Lampiran 5**)

Pembentukan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tersebut dapat diwujudkan setelah diadakan serangkaian pertemuan oleh wakil-wakil Majelis Agama dan pejabat-pejabat Departemen Agama. Pada pertemuan Tingkat Puncak antar pimpinan Majelis-Majelis agama dan pejabat-pejabat Departemen Agama di Jakarta tanggal 30 Juni 1980 telah disepakati Pedoman Dasar tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama yang menjadi dasar bagi pembentukan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama oleh Menteri Agama.⁷ Pertemuan itu dihadiri oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), DGI (Dewan Gereja-gereja di Indonesia), MAWI (Majelis Agung Waligereja Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), dan WALUBI (Perwalian Umat Buddha Indonesia). Setelah terbentuknya wadah tersebut, umat beragama dan pemerintah diharapkan dapat membahas dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bersama melalui

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

musyawarah, konsultasi, dan komunikasi yang didasari pada komitmen agama, Pancasila, dan UUD 1945.⁸

DGI didirikan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1950. Pada Sidang Raya DGI di Ambon, pada tahun 1984 namanya diganti menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).⁹ Sedangkan MAWI berdiri pada tahun 1955, kemudian berubah menjadi Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) pada tahun 1987.¹⁰ PHDI berdiri di Denpasar pada tanggal 23 Februari 1959. Adapun WALUBI didirikan di Jakarta tanggal 2 Agustus 1978.¹¹

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) juga merupakan sebuah lembaga keagamaan yang diakui di Indonesia. Setelah pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000, hak-hak sipil umat Konghucu pulih kembali.¹² MATAKIN berdiri pada tanggal 16 April 1955.¹³

Lembaga-lembaga keagamaan tersebut merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang dikelola oleh Departemen Agama. Lembaga tersebut bertujuan membina, mengembangkan, dan menyiarkan agama, dibentuk atas dasar kesamaan, baik kegiatan maupun profesi, fungsi, dan agama. Lembaga ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985.¹⁴

⁸ Rahmat Fajri, *op.cit.*, hlm. 36.

⁹ Rahmat Fajri, *op.cit.*, hlm. 34.

¹⁰ Lihat http://www.id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Waligereja_Indonesia, diakses tanggal 21 Oktober 2007.

¹¹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 26.28.

¹² Rahmat Fajri, *op.cit.*, hlm. 32.

¹³ Lihat http://www.id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Tinggi_Agama_Konghucu_Indonesia, diakses tanggal 21 Oktober 2007.

¹⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 15.

Pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Maka dari itu, untuk menyesuaikan pelaksanaan otonomi daerah, dikeluarkanlah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/ Nomor 8 tahun 2006.¹⁵

Peraturan ini di antaranya menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB dibentuk di Propinsi dan Kabupaten/ Kota. FKUB memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.¹⁶

FKUB mempunyai tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung dan menyalurkan aspirasi Ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi; serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.¹⁷

¹⁵ Lihat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/ Nomor 8 tahun 2006 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat*, 21 Maret 2006 pada **Lampiran 9**.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Ormas keagamaan atau organisasi kemasyarakatan keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.¹⁸

B. Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat, dan agama merupakan suatu kenyataan yang kita syukuri sebagai kekayaan bangsa. Namun, di samping itu, kemajemukan atau keanekaragaman juga dapat mengandung kerawanan-kerawanan yang dapat memunculkan konflik-konflik kepentingan antar kelompok yang berbeda-beda tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Di antara upaya tersebut adalah pembinaan kerukunan antar umat beragama¹⁹, dengan membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan antar umat beragama di Indonesia.

1. Pendirian dan Penggunaan Tempat Ibadat

Peraturan mengenai pendirian dan penggunaan tempat ibadat sebelumnya telah ditetapkan Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/ BER/ MDN-MAG/

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm. 1.

1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya, dan kemudian digantikan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006/ Nomor 8 tahun 2006.

Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan, atau pengurus rumah ibadat.²⁰

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/ walikota untuk pembangunan rumah ibadat. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan/ Desa. Jika tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk menggunakan batas wilayah Kecamatan, atau Kabupaten/ Kota, atau Propinsi. Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.²¹

Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu, harus memenuhi

²⁰ Lihat Pasal 1 pada **Lampiran 9**.

²¹ Lihat Pasal 1 dan Pasal 13 pada **Lampiran 9**.

persyaratan seperti daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa, rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota; rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/ Kota namun jika belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat; serta rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota; dan rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/ Kota.²²

Permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Bupati/ Walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat. Bupati/ Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan.²³

Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/ Walikota dengan persyaratan laik fungsi, dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Surat keterangan pemberian izin sementara tersebut berlaku dua tahun.²⁴

²² *Ibid.*

²³ Lihat Pasal 16 pada **Lampiran 9**.

²⁴ Lihat Pasal 18 dan Pasal 19 pada **Lampiran 9**.

Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Jika musyawarah tidak dapat dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/ Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/ Kota. Apabila penyelesaian perselisihan tetap tidak dapat dicapai juga, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.²⁵

2. Penyiaran Agama dan Tenaga Keagamaan

a. Penyiaran Agama

Penyiaran agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat, dan tujuannya untuk menyebarkan ajaran sesuatu agama. Pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, tepa selira, saling menghargai, hormat menghormati antar umat beragama, guna menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama.²⁶

Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok yang telah memeluk/ menganut agama lain, dengan cara :

- a) Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan

²⁵ Lihat Pasal 21 pada **Lampiran 9**.

²⁶ Lihat Pasal 1 ayat 1 pada **Lampiran 2**, dan poin Pertama pada **Lampiran 4**.

bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/ menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/ menganut agama yang disiarkan tersebut.

- b) Menyebarakan pamflet, majalah, buletin, buku, buku dan bentuk-bentuk barang penerbitan, cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/ menganut agama yang lain.
- c) Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/ menganut agama yang lain.²⁷

b. Tenaga Keagamaan

Penggunaan tenaga asing untuk pengembangan dan penyiaran agama atau untuk melakukan kegiatan di bidang agama dibatasi dan hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari Menteri Agama. Warga negara asing yang ada di Indonesia yang tugas pokoknya di luar bidang agama, hanya dibenarkan melakukan kegiatan di bidang agama secara insidental, setelah mendapat izin dari Menteri Agama. Lembaga-lembaga Keagamaan wajib mengadakan program pendidikan dan latihan dengan tujuan agar dalam waktu yang ditentukan tenaga-tenaga warga negara Indonesia dapat menggantikan tenaga asing tersebut. Program pendidikan dan latihan itu harus dilakukan selambat-

²⁷ Lihat Pasal 4 pada **Lampiran 4**.

lambatnya 2 tahun setelah pelaksanaan program pendidikan dan latihan tersebut.²⁸

Penggunaan rohaniwan asing dan atau tenaga asing lainnya atau penerimaan segala bentuk bantuan lainnya dalam rangka bantuan luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Tenaga asing di bidang agama yang mengajukan permohonan naturalisasi menjadi warga negara Republik Indonesia harus mendapat rekomendasi dari Menteri Agama.³⁰

Dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 tahun 1979 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, pada dasarnya memperkuat dan melengkapi Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 70 dan Nomor 77 tahun 1978. Keputusan bersama ini ditetapkan bukan bermaksud untuk membatasi, tetapi bertujuan agar usaha-usaha penyiaran agama dapat berlangsung tertib dan serasi.³¹

“Pemerintah telah memberikan kebebasan dakwah dari segala macam izin. Kebijaksanaan ini membawa tanggung jawab yang besar bagi umat beragama, dalam arti memikul kepercayaan untuk tidak menyalahgunakan kebebasan, yaitu kebebasan dalam batas tanggung jawab

²⁸ Lihat Pasal 3 pada **Lampiran 3**.

²⁹ Lihat Pasal 6 pada **Lampiran 4**.

³⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 46.

³¹ Lihat **Lampiran 4**.

bersama. Dengan demikian, kebebasan menyampaikan ajaran agama Islam sesuai dengan Alquran dan Assunnah (Hadits) dan bukan digunakan sebagai agitasi, apalagi dijadikan arena mengeluarkan uneg-uneg dendam kesumat pribadi". "Kebebasan beragama akan tetap terjamin. Akan tetapi, tidak berarti kebebasan untuk mengagamakan orang yang telah beragama. Segalanya ada batas antara hak dan kewajiban. Ada batas yang tidak boleh dikorbankan demi prinsip lain, seperti hak asasi manusia. Hak asasi manusia, termasuk penyebaran agama tetap dihargai dan dihormati, akan tetapi hak itu hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu hak asasi orang lain, yang akan menghancurkan keseluruhan sistem, yaitu demokrasi Pancasila yang menghormati keragaman, di mana eksistensi semua agama dan umatnya bebas merdeka tanpa merasa diganggu oleh propaganda agama lain"³²

3. Bantuan Dana Organisasi Kemasyarakatan dari dan ke Luar Negeri, serta di dalam Negeri

Keuangan Organisasi Kemasyarakatan diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan usaha lain yang sah dengan mendapat persetujuan dari Pemerintah. Bantuan yang diperoleh dari luar negeri harus dengan persetujuan pemerintah pusat.³³

³² Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 34.

³³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 30-31.

Bantuan luar negeri adalah segala bentuk bantuan berasal dari Luar Negeri yang berwujud bantuan tenaga, barang dan atau keuangan, fasilitas, dan bentuk bantuan lainnya, yang diberikan oleh pemerintah negara asing, organisasi atau perseorangan di luar negeri kepada lembaga keagamaan dan atau perseorangan dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan penyiaran agama di Indonesia.³⁴

Bantuan kepada pihak asing supaya tidak merusak hubungan antara negara Indonesia dan negara lain; tidak menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara; tidak mengganggu stabilitas nasional; serta tidak merugikan politik luar negeri.³⁵

Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum; serta menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah pusat dan/ atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya. Jika masih tetap melakukan kegiatan tersebut, maka pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan. (UU Nomor: 8/ 1985 pasal 13 dan 14).³⁶

4. Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan

Tentang pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan, pada tanggal 25 Agustus 1981, Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama

³⁴ Lihat Pasal 2 ayat 3, pada **Lampiran 4**.

³⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, 31.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

bersepakat untuk menyampaikan rekomendasi/ saran kepada Menteri

Agama, berupa pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a. Peringatan hari-hari besar keagamaan pada umumnya telah berakar dan melembaga dalam kehidupan dan budaya bangsa Indonesia merupakan sarana peningkatan penghayatan dan pengamalan agama dan merupakan sarana dalam pembangunan kehidupan beragama serta pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, sebagai salah satu unsur utama dan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional.
- b. Peringatan hari-hari besar keagamaan pada dasarnya diselenggarakan dan dihadiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan, namun adalah wajar bila pemeluk agama lain turut menghormati sesuai dengan asas kekeluargaan, bertetangga baik dan kegotong-royongan, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.
- c. Para pejabat Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang wajar dan adil dalam melayani hajat keagamaan bagi semua pemeluk agama dalam wilayah kewenangannya, sesuai dengan isi pidato Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1981 termaksud di atas, bahwa hendaknya “segenap dan setiap warga negara berhak mendapat perlakuan pelayanan yang wajar dan adil dari aparat Pemerintah, juga dalam bidang agama” dan kehadirannya dalam upacara keagamaan dari suatu agama yang tidak dipeluknya hendaknya dalam sikap pasif namun khidmat. Sikap demikian ini hendaknya dimiliki setiap insan manusia.
- d. Para guru, sebagai pembina anak didik tunas harapan bangsa, hendaknya dapat membekali diri dengan pengetahuan keagamaan agar dapat membina jiwa kerukunan anak didiknya menjadi lebih mantap, tanpa mengurangi keyakinan dan keimanan agama yang dipeluknya masing-masing.
- e. Kepada pemimpin lembaga kemasyarakatan perlu dihimbau untuk memperhatikan hajat keagamaan dan memberikan kesempatan pelaksanaan ibadah dan peringatan hari-hari besar keagamaan bagi semua pemeluk dalam wilayah kewenangannya, dan agar bijaksana sehingga tidak menimbulkan kesan adanya paksaan atau larangan dan pembauran akidah dan syariat (ajaran dan aturan) agama yang berbeda-beda.³⁷

Sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tertanggal 25 Agustus 1981, dan petunjuk Presiden, pada tanggal 1 September 1981, dikeluarkanlah Surat

³⁷ Lihat Lampiran 6.

Edaran Menteri Agama Nomor: MA/ 432/ 1981. Pada dasarnya peringatan hari-hari besar keagamaan hanya diselenggarakan dan dihadiri oleh para pemeluk agama yang bersangkutan; namun sepanjang tidak bertentangan dengan akidah/ ajaran agamanya, pemeluk agama lain dapat turut menghormati, sesuai dengan asas kekeluargaan, bertetangga baik dan kegotong-royongan.³⁸

Unsur peribadatan ialah “ibadah” bagi Islam, “kebaktian/ liturgia” bagi Kristen Protestan dan Katholik, yang terkandung dalam penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan merupakan bentuk ajaran agama yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemimpin/ Pemuka Agama yang bersangkutan untuk mengaturnya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berkaitan dengan hal ini, maka hanya pemeluk agama bersangkutan yang menghadirinya. Perayaan dan kegiatan penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan yang di dalamnya tidak ada unsur ibadat dapat dihadiri dan diikuti oleh pemeluk agama lain.³⁹

Biaya penyelenggaraan ditanggung pemeluk agama yang bersangkutan, dan tidak selayaknya mengusahakan sumbangan kepada bukan pemeluknya. Namun, tidak berarti seseorang dilarang memberikan sumbangan atau hadiah kepada pemeluk agama lain atas dasar sukarela dan persahabatan.⁴⁰

³⁸ Lihat **Lampiran 7**.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Jika mengundang pemeluk agama lain, hendaknya surat undangan dilampiri dengan susunan acara yang telah mengindahkan ketentuan tersebut di atas demi tertib dan lancarnya penyelenggaraan.⁴¹

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama Nomor: MA/432/1981, Presiden memberikan pokok-pokok petunjuk, antara lain :

- a. Surat Edaran Menteri Agama tersebut jangan hendaknya dikaitkan dengan masalah yang bukan-bukan. Akan tetapi supaya dikaitkan dengan tujuan kemerdekaan kita yaitu merdeka, bersatu, mencapai masyarakat adil dan makmur.
- b. Sebagai jaminan kelanjutan mencapai tujuan kemerdekaan tersebut, hendaknya dalam menghadapi persoalan agama kita harus berhati-hati. Dikarenakan soal agama merupakan salah satu soal yang dapat membahayakan apabila kita sama-sama kurang berhati-hati.
- c. Tujuan Pemerintah dengan Surat Edaran Menteri Agama itu, bukan mencampuri soal-soal agama, tetapi yang diatur ialah penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan demi persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. (Petunjuk Presiden sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor : MA/432/1981).⁴²

5. Peraturan dalam Bidang Perkawinan

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. (UU Nomor 1/1974 pasal 2 ayat 1). Maka, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang. (Penjelasan UU Nomor 1/1974 pasal 2 ayat 1)⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 77-78.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 69-70.

Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. (UU Nomor 1/ 1974 pasal 8f). Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan pasal 42).⁴⁴

6. Penodaan dan Penghinaan Agama

Pemerintah melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Maksudnya, segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya.⁴⁵

Barang siapa melanggar ketentuan tersebut, diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Apabila pelanggaran tersebut masih dilakukan, Presiden

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 70-72.

⁴⁵ Lihat Lampiran 1.

dapat membubarkan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang.⁴⁶

Sanksi pidana diberikan jika mereka masih terus melanggar hal tersebut, dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156 a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- (1) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- (2) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. (UU Nomor 1/ PNPS/ 1965 jo UU No. 5/ 1969)⁴⁷

C. Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Keberagaman bangsa Indonesia yang meliputi berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, budaya, dan agama, merupakan faktor yang potensial bagi timbulnya disintegrasi bangsa. Berkenaan dengan itu persatuan dan kesatuan bangsa merupakan politik nasional yang strategis, karena berkaitan langsung dengan eksistensi negara Republik Indonesia.

Agama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan sensitif. Interaksi antar warga masyarakat yang berbeda agama perlu dibina dan ditangani secara arif dan bijaksana dengan mendorong suasana dialogis, jujur, dan bertanggung jawab memecahkan berbagai masalah yang

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

menjadi penyebab timbulnya gangguan kerukunan hidup umat beragama.

Departemen Agama sebagai lembaga pemerintahan yang bertugas mengatur tata kehidupan beragama dalam sistem kehidupan nasional, bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan setiap kerawanan yang timbul, sebagai akibat pergaulan umat beragama. Agar senantiasa dapat mendeteksi dan mencegah secara dini timbulnya kerawanan, menanggulangi, maupun merehabilitasi kerukunan hidup umat beragama.

Kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama pada hakikatnya adalah suatu persengketaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan masalah-masalah keagamaan, baik intern umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah, yang menjurus pada konflik terbuka dan tindakan-tindakan anarki dengan ciri kekerasan fisik serta pelecehan hukum. Apabila keadaan tersebut dibiarkan berlangsung, dapat mengganggu stabilitas nasional dan integritas bangsa. Kerawanan dapat terjadi secara mendadak ataupun bertahap/ eskalatif. Umumnya terjadi tindakan yang sifatnya spontan.

Adapun kegiatan keagamaan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, antara lain adalah:

- 1) Pendirian tempat ibadah

Tempat ibadah yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat sering menciptakan ketidakharmonisan umat beragama yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama.

2) Penyiaran Agama

Penyiaran agama, baik secara lisan, melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran dan sebagainya, maupun media elektronika, serta media yang lain dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama. Lebih-lebih yang ditujukan kepada orang yang telah memeluk agama lain.

3) Bantuan Luar Negeri

Bantuan dari luar negeri untuk pengembangan dan penyebaran suatu agama, baik yang berupa bantuan materiil/ finansial ataupun bantuan tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan yang ada, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kerukunan hidup umat beragama, baik intern umat beragama yang dibantu, maupun antar umat beragama.

4) Perkawinan Beda Agama

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, walaupun pada mulanya bersifat pribadi dan konflik antar keluarga, sering mengganggu keharmonisan dan kerukunan hidup umat beragama. Lebih-lebih apabila sampai kepada akibat hukum dari perkawinan tersebut, atau terhadap harta benda perkawinan, warisan dan sebagainya.

5) Perayaan hari besar keagamaan

Penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan yang kurang mempertimbangkan kondisi dan situasi serta lokasi di mana perayaan tersebut diselenggarakan dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.

6) Penodaan Agama

Perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai ajaran dan keyakinan suatu agama tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.

7) Kegiatan aliran sempalan

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan dan menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama, dapat menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama.

8) Aspek Non Agama yang Mempengaruhi

Aspek-aspek non agama yang dapat mempengaruhi kerukunan hidup umat beragama antara lain : kepadatan penduduk, kesenjangan sosial-ekonomi, pelaksanaan pendidikan, penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang berskala regional maupun internasional, yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan agama.

Mencegah timbulnya kerawanan merupakan upaya yang terbaik, karena dapat memberikan ketenangan, kedamaian, dan kesejukan kepada umat beragama untuk dapat melaksanakan ajaran agamanya. Untuk menciptakan kondisi yang demikian harus diusahakan sejak dini melalui bimbingan dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama oleh jajaran Departemen Agama, baik di pusat maupun di daerah, antara lain:

1) Penyuluhan dan pemasyarakatan peraturan perundangan terutama yang berhubungan dengan pembinaan tata kehidupan beragama, seperti :

- a) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/ Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- b) Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1979 tentang Tatacara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
- c) Keputusan Menteri Agama Nomor: 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
- d) Keputusan Menteri Agama Nomor: 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
- e) Surat Edaran Menteri Agama Nomor: MA/ 432/ 1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan.

2) Perumusan Kode Etik Pergaulan Umat Beragama

Kode etik pergaulan umat beragama mempunyai peranan penting bagi upaya membina kerukunan hidup umat beragama. Melalui kode etik seorang pemeluk suatu agama dapat memahami bagaimana bersikap terhadap orang lain yang berbeda agama. Berbagai kebijaksanaan pemerintah di bidang ini pada hakikatnya merupakan rintisan untuk mewujudkan kode etik pergaulan umat beragama tersebut.

3) Membina dan Memupuk Sikap Hidup Rukun

Sikap dan perilaku hidup rukun yang telah mengakar dan membudaya di kalangan warga masyarakat hendaknya dibina dan dipupuk. Upaya membina dan memupuk sikap hidup rukun tersebut dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan kerja sama sosial kemasyarakatan, kegiatan bantuan umat beragama dan forum-forum kegiatan lain yang melibatkan umat beragama.

4) Pembentukan Kader Kerukunan Umat Beragama

Setiap satuan organisasi Departemen Agama di Propinsi dan di Kabupaten/ Kota hendaknya membentuk dan membina kader-kader kerukunan hidup beragama yang terdiri dari para pemuda-pemudi wakil dari Majelis-majelis Agama, dan tokoh-tokoh agama.

Kader-kader kerukunan tersebut hendaknya selain mampu mengerti, memahami, dan menghayati kerukunan hidup beragama hendaknya juga mampu menjadi motivator, dinamisator, dan stabilisator masyarakat dalam membina kerukunan hidup umat beragama.

5) Forum Pertemuan Pemuka Agama

Dalam rangka pembinaan kerukunan hidup beragama, perlu diselenggarakan forum pertemuan tatap muka antara pemuka-pemuka agama dengan pimpinan satuan organisasi Departemen Agama di Propinsi dan Kabupaten/ Kota secara berkala. Forum pertemuan tersebut dapat berwujud forum dialog, musyawarah, silaturahmi, sarasehan, dan

sebagainya, sebagai forum untuk saling tukar informasi, konsultasi, dan sebagainya.

Apabila upaya pencegahan kerawanan telah dilakukan secara optimal, tetapi terjadi keadaan luar biasa (kerawanan), maka tindakan yang dilakukan adalah menanggulangi kerawanan tersebut dengan cepat, tepat, dan arif.

Sepanjang masih dalam tingkat kerawanan, yakni pra krisis dan purna krisis, penanggulangan dilakukan oleh aparat Departemen Agama dibantu oleh instansi terkait dan aparat Hankam. Apabila sudah masuk dalam keadaan krisis, penanggulangan dilakukan oleh aparat keamanan dan dibantu oleh aparat Departemen Agama, dan instansi terkait.

Uraian tentang penanggulangan kerawanan kerukunan hidup umat beragama di atas merupakan ringkasan dari Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan di Bidang Kerukunan Hidup Umat Beragama, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 1996, oleh Menteri Agama Tarmizi Taher.⁴⁸

⁴⁸ Selengkapnya lihat **Lampiran 8**.



BAB IV

BAB IV
PROSPEK KEHIDUPAN BERAGAMA
ANTARA UMAT ISLAM DAN KRISTEN DI INDONESIA

Sejarah Indonesia modern menunjukkan bahwa komunitas Muslim dan Kristen merupakan dua kelompok umat beragama yang paling sering terlibat dalam konflik dan pertikaian. Ini berarti, kedua kelompok tersebut sebenarnya merupakan elemen yang sangat penting bagi terciptanya harmoni di masyarakat. Bisa dikatakan bahwa hubungan antara keduanya menjadi variabel sosial paling menentukan bagi persatuan bangsa.¹ Maka dari itu, perlu digali seberapa besar prospek terciptanya suasana kehidupan beragama yang harmonis antara keduanya, yang merupakan hal strategis dalam rangka menciptakan kerukunan antar umat beragama di negara Indonesia yang plural dan majemuk ini.

A. Pancasila sebagai Konvergensi Nasional

Sebagaimana telah diketahui ideologi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Pancasila. Menurut Nurcholish Madjid, Pancasila adalah sebagai konvergensi nasional, yaitu titik temu bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Bentuknya, adanya saling pengertian, *mutual understanding*, dan berakar dalam semangat kesediaan untuk saling memberi

¹ Frans Magnis-Suseno, "Islam dan Kristen Bom Waktu atau Tumpuan Harapan" dalam *Basis*, no. 03-04, Tahun ke-48, Maret-April 1999, hlm. 7, dalam Ahmad Muttaqin, "Konstruksi Media Atas Wacana Kristenisasi Di Indonesia", *Religi*, Vol III, No. 1, Januari 2004, hlm. 33.

dan menerima dalam kemantapan masing-masing kelompok, golongan, maupun agama, serta hilangnya kecurigaan antar kelompok.²

Kecenderungan konvergensi Nasional harus diarahkan kepada penguatan pandangan hidup dalam tata pergaulan nasional, dalam arti lahiriah maupun maknawiah, yang berwawasan meliputi seluruh anggota bangsa. Hal ini mengingat bahwa, dalam kenyataannya, negara Indonesia adalah negara majemuk.³

Hal ini dibutuhkan, karena modal nasionalitas yang sangat berharga adalah keutuhan wilayah negara, bahasa kesatuan, konstitusi, dan falsafah negara, sistem pemerintahan, yang meliputi seluruh tanah air, jajaran militer sebagai tulang punggung ketertiban maupun keamanan, dan keberhasilan menerapkan pluralitas. Karenanya, Nurcholish mempunyai harapan yang optimal. Dengan modal nasionalitas yang ada, menunjukkan adanya kecenderungan umum bangsa Indonesia ke arah suatu konvergensi nasional, yaitu sebagai titik temu bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuannya agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijaga dan dipertahankan.⁴

Ideologi negara Pancasila, sebagai bentuk konvergensi nasional dalam peringkat formal konstitusional, telah menunjukkan keefektifannya sebagai

² Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keislaman* (Bandung: Penerbit Mizan, 1991), hlm. 39.

³ *Ibid.*, hlm. 40.

⁴ *Ibid.*, hlm. 39.

penopang republik. Pancasila yang diperlukan sekarang ialah yang berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan.⁵

Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia merupakan satu bangsa yang memiliki heterogenitas tertinggi secara fisik. Sebagai indikatornya dapat dilihat Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki beraneka ragam suku, bahasa daerah, adat istiadat, bahkan agama. Menurut Nurcholish, heterogenitas itu, bukan saja merupakan sesuatu yang sudah “*given*”, akan tetapi juga harus diperhitungkan. Memperhatikan fakta ini, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah mempertimbangkan kondisi sosial budaya Indonesia yang ciri utamanya adalah *pertumbuhan, perkembangan, dan kemajemukan*.⁶

Dengan rumusan seperti ini, akan terjalin hubungan harmonis antara semua pemeluk agama di Indonesia. Maka persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam NKRI tetap terjaga dan utuh. Rumusan ini bukan untuk kepentingan sesaat tetapi untuk kepentingan jangka panjang bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama. Sekaligus rumusan ini merupakan perwujudan perlunya rekonsiliasi nasional di antara seluruh bangsa Indonesia yang plural.⁷

Kita akui, hubungan antar umat beragama di Indonesia sejauh ini tidak bisa lepas dari problem mayoritas dan minoritas. Di kalangan mayoritas sering

⁵ *Ibid*, hlm. 44.

⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. xi.

⁷ Agussalim Sitompul, *Usaha-usaha Mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam Sebelum dan Pasca Reformasi* (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2007), hlm. 421.

timbul perasaan tidak puas karena merasa terdesak posisi dan perannya. Sedang di kalangan minoritas sering timbul ketakutan karena merasa terancam eksistensi dan hak-hak asasinya. Potensi ketidakharmonisan dalam konteks mayoritas-minoritas di atas jika tidak bisa dieliminasi akan membawa implikasi dalam hubungan antar umat berbagai agama, pergaulan masyarakat, dan bisa menggejala dalam berbagai bentuk ketegangan.⁸

Di antara semua golongan harus ada saling pengertian. Golongan minoritas yaitu penganut agama Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu dengan penuh jiwa dan semangat toleransi untuk dapat memahami hak dan kedudukan golongan mayoritas yaitu umat Islam di Indonesia.⁹

Begitu juga golongan mayoritas yaitu umat Islam Indonesia kiranya dapat memahami hak dan kedudukan golongan minoritas di Indonesia yaitu penganut agama Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, untuk dapat melaksanakan ajaran agamanya bagi masing-masing pemeluknya di Indonesia. Dengan demikian, terciptalah hubungan dan kehidupan yang harmonis bagi seluruh bangsa Indonesia dengan titik temu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.¹⁰

Menurut Nasikun, sifat majemuk masyarakat Indonesia memang telah menjadi sebab dan kondisi bagi timbulnya konflik-konflik sosial, yang mendorong tumbuhnya proses integrasi sosial di atas landasan *coersion*

⁸ Greg Barton, "Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme, Nurcholish Madjid, Djohan Effendy, Ahmad Wahab, dan Abdurrahman Wahid", (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 24, dalam Zubaedi, *op.cit.*, hlm. 47.

⁹ Agussalim Sitompul, *op.cit.*

¹⁰ *Ibid.*

(pemaksaan). Akan tetapi, di lain pihak, proses integrasi tersebut juga terjadi di atas landasan konsensus bangsa Indonesia mengenai nilai-nilai fundamental tertentu. Kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, sangat jelas menunjukkan betapa nasionalisme Pancasila telah menjadi daya spiritual yang sejak awal mempersatukan bangsa Indonesia.¹¹

Bersama-sama dengan tumbuhnya konsensus nasional mengenai nilai-nilai nasionalisme Pancasila yang senantiasa bertanggapan secara dinamis dengan mekanisme pengendalian konflik yang bersifat *coersive* (memaksa), maka struktur masyarakat Indonesia yang bersifat silang-menyilang (*cross-cutting*) itu telah menjadi landasan mengapa masyarakat Indonesia tetap dapat lestari dari masa ke masa, kendati ia harus mengarungi samudera penuh dengan berbagai gelombang dan pertentangan.¹²

B. Orientasi Missi, Zending, dan Dakwah

Missi, zending, dan dakwah adalah tiga buah konsep yang pada dasarnya mengandung pengertian dan tujuan sama, yaitu tugas penyebarluasan agama. Memang, misi biasanya diartikan sebagai organisasi-organisasi yang menyebarkan agama Kristen Katholik ke mana dan di mana saja. Sedangkan zending diberi arti sebagai “pekabaran Injil, usaha-usaha kaum Protestan menyebarkan agama Kristen Protestan dan menegakkan gereja-gereja Protestan”. Bagi kaum Protestan, pekabaran Injil atau zending itu sama

¹¹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 105.

¹² *Ibid.*, hlm. 108.

saja dengan gereja, karena keduanya merupakan dwi tunggal yang tak terpisah.¹³

Dakwah berasal dari bahasa Arab yang mengandung bermacam-macam arti, seperti: ajakan, seruan, propaganda, panggilan, undangan. Pada konteks Islam, maka dakwah mengandung arti penyiaran atau penyebarluasan Islam dengan jalan mengajak, menyeru, memanggil, dan mengundang manusia agar menerimanya atau mempropagandakan Islam kepada siapa saja, supaya diterima. Berbeda dengan istilah *missi* dan *zending*, yang masing-masing berasal dari bahasa Inggris dan Belanda, dan tidak merupakan istilah asli dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka istilah dakwah adalah berasal dari Alquran, kitab suci umat Islam.¹⁴

Islam dan Kristen diidentifikasi sebagai agama dakwah atau agama missionaris, yakni agama yang penyiaran kebenarannya dan menjadikan orang lain memeluknya, terbilang kepada tugas suci oleh para pendiri atau pewaris-pewarisnya yang awal. Desakan jiwa kebenaran yang bersemayam dalam hati nurani orang-orang berimannya, menjadikan mereka tidak merasa tenang kecuali apabila kebenaran itu menampakkan dirinya dalam pemikiran, kata-kata, dan perbuatan. Mereka merasa puas, bila telah berhasil membawa dan menanamkan kebenaran itu ke dalam jiwa manusia lain dengan berbagai cara sampai manusia lain itu menerimanya. Jiwa kebenaran seperti itulah yang memberi semangat hidup kepada pengikut-pengikut agama dakwah tersebut di

¹³ Burhanuddin Daja, "Dakwah Missi, Zending, dan Dialog Antar Agama di Indonesia", dalam Djam'annuri (ed.), *70 tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 464.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 465.

manapun mereka berada dan kapan pun mereka hidup. Semboyan-semboyan yang menyimbolkan kebenaran absolut menjadi pegangan dasar pelaksanaan dakwah.¹⁵

Banyak hal yang bisa dilakukan missi, zending, dan dakwah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan umat yang hidup dalam suasana penuh kerukunan. Antara lain seperti, mengembangkan missi, zending, dan dakwah, bermuatan nilai-nilai dasar yang bisa didukung dan diterima peranannya secara bersama-sama oleh umat beragama; pelaksana missi, zending, dan dakwah harus siap menerima umat lain sebagaimana adanya, agar bisa membangun masyarakat secara bersama-sama; memberikan penghargaan positif terhadap penganut agama lain; saling tolong menolong antara sesama umat berbeda agama; menjaga hubungan rukun dengan para tetangga yang berbeda agama; melakukan aktivitas-aktivitas sosial lain, seperti rekreasi bersama, kunjungan bersama, dan sebagainya.¹⁶

Kegiatan missi, zending, dan dakwah acapkali menimbulkan gesekan-gesekan dengan komunitas agama lain, sebagai akibat dari dangkalnya orientasi.¹⁷ Tugas dakwah atau missi keagamaan tidak mesti diabaikan, tetapi perlu dievaluasi dan di rubah arah dan sifatnya. Kalau selama ini pelaksanaan missi, zending, dan dakwah itu lebih diarahkan keluar dengan sifat agresif, mencari tambahan pengikut baru secara kuantitatif, harus dialihkan ke arah intern umat sendiri untuk meningkatkan pembinaan kualitas saudara seiman.

¹⁵ Burhanuddin Daja, "Bingkai Teologis Kerukunan dan Upaya Pemasyarakatannya", *Esensia*, Vol. 1 No. 1, Januari 2000, hlm. 22.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁷ Wiwin Siti Aminah, "Pluralisme dan Konflik Antar-Agama di Indonesia", dalam *Religi*, Vo. II, No. 1, Januari 2003, hlm. 69.

Percayakan dan relakanlah orang yang berbeda agama dengan kita untuk mencari dan puas dengan kebenaran yang diyakini dan didapatnya dari agamanya sendiri. Ini berarti kita harus rela mengubah orientasi misi, zending, dan dakwah kita dari agresif dan aktif keluar menjadi agresif dan aktif ke dalam.¹⁸

Jika perubahan orientasi misi, zending, dan dakwah tersebut terlaksana, serta undang-undang mengenai penyebarluasan/ penyiaran agama yang telah ditetapkan pemerintah dijalankan sebagaimana mestinya, maka tidak tertutup kemungkinan, timbulnya kasus-kasus pertentangan, konflik sosial keagamaan tidak terjadi lagi di kemudian hari, dan hubungan yang harmonis antara kedua agama tersebut dapat terwujud di negara Indonesia ini.

C. Pluralisme dan Dialog Antar Umat Beragama

Persoalan hubungan antar umat beragama agaknya senantiasa akan menjadi tema yang menarik, hal ini setidaknya dikarenakan dua hal, *pertama*, agama dianggap sesuatu yang vital dan berhubungan dengan sesuatu yang diyakini kebenarannya secara final, sementara dalam realitasnya tidak hanya ada satu agama yang dipercaya manusia, tetapi banyak (fenomena pluralisme agama). *Kedua*, pola hubungan antar agama yang sering memunculkan konflik dan ketegangan, baik dalam dimensi teologis-doktrinal maupun dalam wilayah politik dan sosial.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁹ Fakhruddin Faiz, "Hubungan Islam-Kristen: Ketika *Truth Claim* Menjadi Landasan Interaksi", *Religi*, Vol. 1, No. 1, Januari 2002, hlm. 87.

Pluralisme merupakan kenyataan yang tak terbantahkan, Pluralisme, dalam bentuk dan bidang apapun, merupakan *sunatullah*. Ia harus diterima apa adanya bahkan dirasakan sebagai hikmah.²⁰ Pluralisme tidak cukup hanya dimaknai sebagai kenyataan adanya ke pelbagaian suku, agama, ras, antar golongan, bahasa, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, tetapi berarti juga komunikasi, interaksi, dan dialog. Pluralisme agama adalah pandangan bahwa realitas kemajemukan agama seharusnya membawa hidup bersama secara berdampingan. Dengan demikian, pluralisme agama tidak semata-mata hanya persoalan mengetahui dan menerima realitas beragamnya agama, tetapi bagaimana hubungan antar agama itu sendiri dibangun dengan penuh keterbukaan, toleransi saling menghormati, dan seterusnya.²¹

Adanya kemajemukan sesungguhnya membuat kehidupan masyarakat menjadi dinamis, penuh warna, tidak membosankan, dan membuat antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan membutuhkan. Pada kehidupan masyarakat yang plural, sikap dasar yang seharusnya dikembangkan adalah sikap bersedia untuk menghargai adanya perbedaan setiap anggota masyarakat. Sehingga, perbedaan akan dipandang sebagai hak fundamental dari setiap anggota masyarakat. Selanjutnya, masyarakat itu sendiri yang menuntut kepada anggotanya untuk menjaga, menghargai, dan menumbuhkan adanya perbedaan itu. Karena tanpa perbedaan masyarakat itu akan berhenti bergerak, dan mati.²²

²⁰ Wiwin Siti Aminah, *op.cit.*, hlm. 60.

²¹ *Ibid.*, hlm. 62.

²² Musa Asy'arie, *Dialektika Agama untuk Pembebasan Spiritual* (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 110-111.

Pluralisme tidak boleh dipahami sekadar “kebaikan negatif” (*negative good*), yang hanya ditilik kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engangement of diversities within the bond of civility*).²³ Dengan demikian, pluralisme adalah pandangan yang menghargai kemajemukan serta penghormatan terhadap pihak lain (*others*), membuka diri terhadap warna-warni keyakinan, kerelaan untuk berbagi (*sharing*), keterbukaan untuk saling belajar (*inklusivisme*), serta keterlibatan diri secara aktif di dalam dialog dalam rangka mencari persamaan (*common belief*) dan menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, tanpa keterlibatan aktif dalam pengembangan sikap dialogis, tidak akan ada pluralisme.²⁴

Konflik adalah suatu persengketaan antara dua pihak atau lebih akibat perbedaan kepentingan.²⁵ Konflik pada hakekatnya merupakan suatu gejala sosial, yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, dan melekat pula di dalam kehidupan setiap bangsa.²⁶ Konflik pada dasarnya merupakan salah satu konsekuensi logis dari pluralisme, atau salah satu bentuk dinamika pluralisme. Ketika masyarakat yang berbeda agama, suku, adat-istiadat, dan seterusnya saling berinteraksi satu sama lain, maka kemungkinan terjadinya konflik sangat terbuka.²⁷

²³ Budhi Munawar Rachman, *Islam Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 31.

²⁴ Zubaedi, *Islam dan Benturan Antarperadaban (Dialog Filsafat Barat dengan Islam, Dialog Peradaban, dan Dialog Agama)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 48.

²⁵ Lihat **Lampiran 8**.

²⁶ Nasikun, *op.cit.*, hlm. 5.

²⁷ Wiwin Siti Aminah, *op.cit.*, hlm. 65.

Apabila diperhatikan, berbagai konflik antar agama itu salah satu penyebabnya berakar pada keyakinan *truth claim* (klaim kebenaran) dan *salvation claim* (klaim keselamatan).²⁸ Ketika tiap-tiap agama merasa paling berhak menafsirkan kebenaran dan merasa paling benar, selain agamanya adalah salah, saat itulah muncul klaim kebenaran (*truth claim*), klaim keselamatan (*salvation claim*), serta beragam klaim fanatisme lainnya.²⁹

Tantangan paling berat ketika seseorang melakukan upaya mewujudkan kehidupan yang harmoni dan saling pengertian antar umat beragama adalah fenomena *truth claim* dan *salvation claim*. Setiap agama mengajarkan bahwa agamanya adalah yang eksklusif, superior, dan benar. Kebenaran dimonopoli oleh agamanya sendiri, dan yang selain agamanya adalah salah. Pemikiran seperti itu menjadi paradigma pola pemikiran agama-agama dalam jangka waktu hampir sepanjang sejarah agama-agama di dunia.³⁰

Umat Kristen mengklaim gereja sebagai sumber penyelamatan satu-satunya dan yang terakhir, sebagaimana terungkap dalam rumusan *extra ecclesiam nulla salus* (tidak ada keselamatan di luar gereja) dan *extra ecclesiam nullus propheta* (tidak ada nabi di luar gereja),³¹ sementara apabila ditelusuri dari Alquran maka umat Islam mengklaim bahwa³²; 1) Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah³³; 2) Islam adalah agama

²⁸ Fakhruddin Faiz, *op.cit.*, hlm. 89.

²⁹ M. Ali Hisyam, "Media Massa dan Dialog Lintas Agama", dalam *Religi*, Vol. III, No. 1, Januari 2004, hlm. 21.

³⁰ Fakhruddin Faiz, *op.cit.*

³¹ Budhi Munawar Rachman, *op.cit.*, hlm. 57.

³² Fakhruddin Faiz, *op.cit.*

³³ Alquran Surat Ali Imran ayat 19 dan 85.

universal³⁴; 3) Islam adalah syariat yang final bagi manusia³⁵; 4) Islam adalah penyempurna atau korektor dari syariat sebelumnya.³⁶

Pada konteks pluralisme, sikap yang demikian itu hanya relevan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat internal. Dunia keserba-ragaman menghendaki agar orang harus saling menahan diri, berlatih “setuju dalam perbedaan” (*agree in disagreement*), membiasakan hidup dalam perbedaan, tidak saling menilai benar atau salah, dan belajar untuk saling menghormati serta menghargai satu sama lain, supaya terhindar dari perbenturan dan konflik yang dapat menimbulkan malapetaka bukan hanya bagi umat beragama tetapi juga manusia secara keseluruhan.³⁷

Dialog adalah cara untuk membangun kembali persahabatan (rekonsiliasi) antara dua pihak yang berselisih dengan masing-masing mengakui adanya perbedaan satu sama lain. Dialog bertujuan untuk mencapai tingkat kebersamaan yang memberi peluang agar hubungan kedua belah pihak berkembang ke arah keberadaan bersama (koeksistensi) dan keberadaan untuk bersama (proeksistensi), sehingga mewujudkan persahabatan yang sejati. Dialog hanya bisa dilakukan apabila masing-masing mempunyai kerelaan untuk saling memandang pihak lain bukan sebagai lawan melainkan pasangan

³⁴ Alquran Surat As-Syura ayat 13.

³⁵ Alquran Surat Al-Maidah ayat 3 dan Al-Ahzab ayat 40.

³⁶ Alquran Surat Al-Maidah ayat 48, An-Nahl ayat 64, Ali Imran ayat 3, dan An-Nisa: 47.

³⁷ Djam’annuri, “Islam dan Pluralisme Agama”, dalam *Esenia*, Vol. 1 No. 1, Januari 2000, hlm. 13. Istilah *agree in disagreement* semula dikemukakan oleh A. Mukti Ali.

(*partner*) yang sederajat dan berusaha untuk memperbaiki keadaan meskipun betapa besar perbedaan dan perselisihan yang dialami antara keduanya.³⁸

Dialog memang tidak menyingkiri perbedaan bahkan memberi hak untuk masing-masing memiliki keunikan dan identitasnya serta tetap menjadi dirinya sendiri. Proses dialog menekankan perlunya berbagai pandangan dan pemikiran yang didasarkan atas anggapan bahwa pasangannya itu mungkin mempunyai kesadaran dan pemahaman yang memberi kemanfaatan bersama. Bahkan boleh dikatakan bahwa dialog itu merupakan perpaduan antara dua kesadaran yang saling bertemu untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengorbankan perbedaan dan keunikan masing-masing. Singkatnya bahwa dialog mencari kesepakatan dalam perbedaan.³⁹

Setiap agama secara kodrati memang cenderung menegaskan klaim kebenaran teologis yang dimilikinya. Namun ketika agama-agama itu hadir secara historis, ia berhadapan dengan pluralisme keagamaan sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Di sini kemudian masing-masing agama perlu berdialog bukan saja dengan dirinya sendiri, tetapi dengan pihak-pihak lain di luarnya, dengan agama-agama di luar dirinya. Upaya ini tidak mudah, sebab di satu sisi, kita tidak mengingkari adanya perbedaan-perbedaan asasi dari masing-masing agama yang mustahil untuk disatukan. Akan tetapi, realitas perbedaan bukan berarti mustahil untuk dijumpai. Dengan kata lain, selalu terdapat kemungkinan bagi terbukanya jalur komunikasi yang dialogis.

³⁸ Zaini Muchtarom, "Bagaimana Mencermati Suatu Dialog?", dalam Djam'annuri (ed.), *70 Tahun H.A. Mukti Ali: Agama dan Masyarakat* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 482.

³⁹ *Ibid.*

Bukan untuk mempersamakan hal yang memang berbeda, tetapi untuk saling bicara dan saling memahami.⁴⁰

Dialog antar umat beragama merupakan sebuah forum yang sangat urgen sebagai wadah untuk saling berkomunikasi, memecahkan suatu masalah, sehingga segala sesuatu yang tidak diinginkan dapat dicegah dan ditangkal. Urgensi dialog antar umat beragama demi terwujudnya kehidupan yang rukun dan damai telah sering dikemukakan oleh Hans Kung: "*No human life without a world ethic for the nations. No peace among the nations without peace among the religions without dialogue among the religions*".⁴¹

Pada akhir abad ke-20 tepatnya tahun 1993 di Chicago telah diselenggarakan deklarasi Parlemen Agama-agama Dunia, untuk menyusun apa yang kemudian dikenal dengan *A Global Ethic*, sebuah Etika Global, satu abad sesudah sebuah parlemen dengan nama yang sama diadakan di kota yang sama pula. Etika Global tadi dirumuskan berdasarkan nilai-nilai moral yang sama dalam setiap agama.⁴²

Pada pertemuan itu diharapkan akan berkembang beberapa komitmen, seperti: komitmen terhadap budaya tanpa kekerasan dan hormat kepada kehidupan, komitmen terhadap budaya solidaritas dan tata keadilan sosial ekonomi, komitmen terhadap budaya toleransi dan kehidupan yang konsisten

⁴⁰ M. Syafii Anwar, "Sikap Positif kepada Ahl al Kitab, dalam Jurnal Ulumul Quran, LSAF dan ICMI, No. 4 vo. IV, 1993, dalam Zubaedi, *op.cit.*, hlm. 47.

⁴¹ Wiwin Siti Aminah, *op.cit.*, hlm. 72. Lihat Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel (ed.), "A Global Ethic: The Declaration of the Parliament of the Worlds Religion" (New York: Continuum, 1993), hlm. 44.

⁴² Djam'annuri, *op.cit.*, hlm. 15. Lihat Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel (ed.), *ibid.*, terutama uraian mengenai prinsip-prinsip Etika Global, pada halaman 17 dan seterusnya.

terhadap kebenaran, dan komitmen terhadap budaya kesamaan hak dan kebersamaan dalam kemitraan laki-laki dan perempuan.⁴³

Sesungguhnya tawaran dialog umat Islam telah direpresentasikan oleh MUI secara kelembagaan. Dialog ini dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu akidah; ibadah; dan muamalah. Aspek akidah mencakup iman kepada Allah, rasulnya, dan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Alquran dan sunnah. Dengan demikian, Alquran menawarkan etika berdialog antar umat yang berbeda agama melalui beberapa ayat. Di antaranya surat al-Hujurat ayat 15; Ali Imran ayat 64; al-Mumtahanah ayat 8, al-Baqarah ayat 256, Yunus ayat 99, dan al-An'am ayat 108. Dari beberapa ayat tersebut menjelaskan isu-isu pola interaksi sosial yang digambarkan dalam bentuk larangan. Karena larangan dengan sendirinya otomatis perintah atau anjuran. Dari ayat-ayat Alquran tersebut ada yang berupa bimbingan yang berkaitan dengan hubungan antar umat manusia yang tujuan sentralnya adalah memperkuat proses persaudaraan (*ukhuwah*).⁴⁴

Dari aspek ibadah yaitu ibadah ghairu maghdoh. Artinya ibadah yang dikerjakan tanpa detail ketentuan-ketentuan syara'. Kongkritnya, hubungan manusia dengan lingkungannya termasuk makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi, terutama antara sesama manusia, dengan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan asal-usul, ras, dan agama. Oleh karena itu, di

⁴³ Burhanuddin Daja, Bingkai Teologis Kerukunan, *op.cit.*, hlm. 21.

⁴⁴ Rahmat Fajri, *op.cit.*, hlm. 36.

sinilah dialog antar umat beragama sangatlah penting, sebab pada dasarnya manusia adalah sesama makhluk Tuhan.⁴⁵

Sedangkan muamalah adalah hubungan sosial yang mencakup aktivitas manusia dalam menjaga kesejahteraan umum, menghilangkan gangguan, dan mempertahankan kerukunan antara satu dengan yang lainnya untuk menciptakan kedamaian.⁴⁶

Dengan demikian pintu dialog antara umat Islam dengan umat agama serta kepercayaan lain sangatlah terbuka, serta memiliki landasan yang kuat. PGI sebagai institusi Kristen Protestan memberikan pandangan teologis bahwa manusia adalah keluarga besar Allah. "Bumi adalah panggung tempat mewujudkan kemuliaan Tuhan" (Markus 16:15). Berdasarkan landasan ini, kehidupan yang harmonis manusia seluruhnya dan makhluk-makhluk lain sebenarnya merupakan refleksi dan manifestasi cinta Kasih Tuhan dalam Yesus Kristus, pengikutnya, dan Roh Kudus. Berdasarkan Petrus 2: 9-10, dan Yohannes 15: 16 bahwa umat Kristen baik sebagai anggota Gereja maupun individu, tidak boleh mengklaim sebagai sumber dan pemilik kebenaran. Mereka hanya sebagai saksi seruan dan kebenaran Tuhan. Sehingga hubungan dialogis adalah cara kesaksian terbaik, akan tetapi dalam dialog ini identitas Kristen tidak boleh menjadi kabur.⁴⁷

Menurut Protestan tantangan saat ini adalah konsep misi dan dakwah yang bersifat memenangkan dan menguasai orang lain. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan adanya pemahaman bahwa misi dan dakwah sebagai

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 37.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

dialog. Sebab, sesungguhnya missi adalah dialog itu sendiri. Lebih lanjut, ada dua pola acuan utama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. *Pertama*, kerukunan harus memuat jiwa kebersamaan dan kekeluargaan itu sendiri di mana perbedaan adalah rahmat tanpa dibarengi diskriminasi, pengasingan dan pemisahan. *Kedua*, kerukunan yang benar dan sejati adalah seseorang tidak merelatifkan perbedaan dan tidak juga mengabsolutkannya dalam hal yang mungkin bisa berhubungan, berdialog, dan bekerja sama.⁴⁸

Muslim dalam pandangan Protestan adalah sama-sama manusia maka tidak dibenarkan menganggap kafir kepada kaum muslimin. Sebab mereka adalah pewaris nilai-nilai Perjanjian Lama dan menyembah serta menyerahkan diri kepada Allah Sang Pencipta seperti yang dilakukan oleh Ibrahim.⁴⁹

Landasan dialog bagi umat Katolik Indonesia sebagaimana yang termuat dalam *Nostra Aetate*, pada Konsili Vatikan II yaitu, bahwa melalui dialog dan kerjasama dengan pengikut agama-agama lain, harus dijaga dengan dasar kecintaan dan kehati-hatian serta dalam kesaksian terhadap kepercayaan dan kehidupan umat Kristiani, mereka diakui, dilayani, dan dihargai sebagai makhluk yang baik yang memiliki jiwa dan moral sebagaimana nilai-nilai sosial Kristiani. Gereja juga menghormati orang-orang Muslim karena mereka ber-Tuhan yang Esa, Pengasih, Pencipta langit dan bumi. Meskipun mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, namun mereka mengakuinya sebagai

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Djaka Soetapa, "Dialog Kristen Islam: Suatu Uraian Teologis" (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan Duta Wacana, 1998), hlm. 7, dalam Rahmat Fajri, *Ibid.*, hlm. 38.

Rasul dan menghormati Bunda Maria sebagai wanita suci yang tidak pernah punya suami, meyakini adanya hari kiamat saat Allah membangkitkan semua yang telah mati. Serta mereka memiliki nilai-nilai moral kehidupan, menyembah Tuhan melalui salat, zakat, dan puasa.⁵⁰ Gereja Katolik tidak menolak apapun, yang dalam agama-agama itu benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus, Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang juga memantulkan sinar Kebenaran, yang menerangi semua orang.⁵¹

Secara umum semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi (Kis 17:26). Semua juga mempunyai satu tujuan terakhir yakni Allah, yang penyelenggaraan-Nya, bukti-bukti kebaikan-Nya dan rencana penyelamatan-Nya meliputi semua orang (Keb 8:1; Kis 14:17; Rom 2:6-17; 1Tim 2:4).⁵²

Maka Gereja mendorong para puteranya, supaya dengan bijaksana dan penuh kasih, melalui dialog dan kerja sama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta peri hidup Kristiani,

⁵⁰ Department of Religious Affairs the Republik of Indonesia Office of Religious Research and Development: Improvement Program of Harmonious Life of Religious Communities, The Theological Frame of Harmonious Life Religious Communities in Indonesia, (Jakarta: 1997), hlm. 123, dalam Rahmat Fajri, *Ibid.*, hlm. 123.

⁵¹ Lihat <http://www.metamorfosa.net/agama/agama.html>, diakses tanggal 29 Januari 2008.

⁵² Lihat selengkapnya dalam <http://pormadi.wordpress.com/2007/09/13/pernyataan-gereja-katolik-tentang-hubungan-dengan-agama-agama-bukan-kristiani/>, diakses tanggal 29 Januari 2008.

mengakui, memelihara dan mengembangkan harta-kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya, yang terdapat pada mereka.⁵³

Memang benar, di sepanjang zaman cukup sering telah timbul pertikaian dan permusuhan antara umat Kristiani dan kaum Muslimin. Konsili Vatikan II mendorong mereka semua, supaya melupakan yang sudah-sudah, dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami, dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang, nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan.⁵⁴

Maka Gereja mengecam setiap sikap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan keturunan atau warna kulit, kondisi hidup atau agama, sebagai berlawanan dengan semangat Kristus.⁵⁵

Gereja Katolik Indonesia mendorong seluruh umatnya untuk melaksanakan serangkaian tindakan nyata pada titik-titik sasaran yang tepat, agar terbangun gerakan yang berkesinambungan demi terwujudnya keadaban publik baru bangsa Indonesia. Sebagai umat minoritas, amatlah terbatas apa yang dapat dilakukan Gereja. Sementara itu, Gereja percaya bahwa banyak pihak lain merasakan kebutuhan yang sama akan terciptanya keadaban publik di negara tercinta ini. Karena itu Gereja mengajak semua pihak lain yang berkehendak baik, untuk sama-sama bergerak membentuk keadaban publik baru itu.

Dorongan tersebut dicanangkan pada akhir Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005 di Wisma Kinasih, Caringin, Jawa Barat hari Minggu

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

tanggal 20 November 2005, sebagai tindak lanjut Nota Pastoral KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) 2004 yang antara lain menyebutkan betapa keadaban publik di Indonesia telah rusak. Dorongan tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat Gereja terlibat dalam masalah keprihatinan bangsa, yang sekaligus merupakan keprihatinan Gereja. Pada pertemuan itu, 36 Uskup dari seluruh Indonesia berkumpul bersama lebih dari 300 peserta lain yang mewakili umat Katolik seluruh Indonesia, dan menganalisis secara objektif situasi ketidakadaban publik negeri ini.⁵⁶

Agar toleransi yang benar dapat terjadi, hendaknya umat Kristen menghindari klaim kebenaran. Ini berarti pula umat Kristen tidak bersaksi tentang superioritas agama Kristen terhadap agama-agama lain. Tugas Kristiani dalam bangsa dan negara yang sekaligus tugas gereja, bukanlah menguasai negara dan dunia ini, tetapi meneranginya.⁵⁷

Sekarang semakin terlihat meningkatnya jumlah penganut dari berbagai agama yang menyuarakan, bahwa kebutuhan manusia terhadap saling mengerti dan kerja sama antar umat beragama jauh lebih penting daripada penaklukan dunia oleh satu agama. Gerakan persahabatan antar umat beragama – *interfaith movement* – merupakan suatu kekuatan kreatif, proyek persaudaraan antar umat berbagai agama yang berbeda yang menjadi pusat tempat mereka bekerja sama bagi menata kehidupan yang rukun lagi penuh kedamaian: damai setiap hati sanubari, damai setiap rumah tangga, damai

⁵⁶ Lihat “Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 16-20 November 2005”, dalam <http://www.icrp-online.org>, diakses tanggal 21 Oktober 2007.

⁵⁷ Victor I. Tanja, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Teologi tentang Isu-isu Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1998), hlm. 17.

setiap bangsa, dan damai seluruh dunia, Islam – *rahmatan lil alamin*, Kristen – *garam dunia*, Buddha – *paramitha*. Inilah landasan spirit untuk perjumpaan dan dialog antar umat beragama.⁵⁸

Berdirinya organisasi atau forum *interfaith* (antar iman) seperti, Dian/Interfidei, Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), dan Forum Persaudaraan Umat Beriman (FBUB) di Yogyakarta; Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA) di Jakarta, Majelis Lintas Agama di Surabaya, serta berpuluh wadah sejenis lainnya di berbagai daerah di Indonesia, merupakan perkembangan yang menggembirakan dalam rangka menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia.

Kehadiran forum *interfaith* yang mengusung paradigma keagamaan yang inklusif-pluralis di tengah-tengah merebaknya wacana keagamaan yang eksklusif atau garis keras saat ini, tentu saja cukup signifikan. Forum semacam ini bisa menjadi alternatif bagi kehadiran persekutuan-persekutuan agama yang eksklusif. Mereka berupaya menafsirkan kembali agama dengan perspektif baru yang mengakomodasi realitas keanekaragaman agama dan keyakinan dalam rangka membangun tatanan kehidupan sosial yang harmonis. Sebaliknya, mereka menolak klaim kebenaran (*truth claim*) yang menyatukan kebenaran agamanya sebagai satu-satunya kebenaran.⁵⁹

Pertumbuhan lembaga *interfaith* memiliki keunikan tersendiri, karena ia lahir dari kesadaran bersama atas realitas kemajemukan yang harus dijawab untuk menemukan kearifan lokal dalam menyelesaikan problem

⁵⁸ Burhanuddin Daja, Bingkai Teologis Kerukunan, *op.cit.*, hlm. 21.

⁵⁹ Zubaedi, *op.cit.*, hlm. 62.

kemasyarakatan. Maka dari itu, modus maupun modelnya mengalami variasi yang sangat beragam sesuai dengan kondisi setempat. Meskipun demikian, mereka disatukan oleh keprihatinan yang sama yakni tumbuhnya keinginan bersama untuk menembus kebekuan hubungan antar umat beragama agar terjalin pola relasi yang lebih dinamis.⁶⁰

Suatu dialog antar umat beragama adalah sama dengan dialog tentang keselamatan (*salvation* atau *salamah*) yang dicita-citakan masing-masing agama. Bila keselamatan dituntut oleh tiap agama, dan karena keselamatan selalu tidak menoleransi usaha yang merugikan keselamatan orang lain, maka sebetulnya apa pun cara yang diajarkan suatu agama untuk mencapai keselamatan, maka tujuan itu sendiri akan menjaga agar cara yang ditempuh jangan sampai merugikan keselamatan orang lain.⁶¹

Jika demikian, maka adanya beberapa peraturan yang berkaitan dengan penyebaran agama, pendirian rumah ibadah, dan bantuan asing memang ditujukan untuk mengatur cara menuju keselamatan itu. Tetapi jika aturan dalam rangka keselamatan itu tidak dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka justru akan menjadi sumber konflik baru. Karena itu sangat diperlukan kesadaran, dan dalam kerangka itu pemerintah sebagai pemimpin formal dan tokoh-tokoh agama sebagai pemimpin non formal memiliki tanggung jawab yang besar. Pemerintah perlu menegakkan peraturan yang ada dan mendorong terciptanya suasana kerukunan, sedangkan tokoh-tokoh agama perlu menyadari bahwa mereka itu sendiri bisa menjadi sumber konflik yang sangat

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Lihat Syafiq A. Mughni, "Kerukunan Antar Umat Beragama dan Konflik Sosial", hlm. 4, dalam <http://www.digilib.ums.ac.id>, diakses tanggal 9 September 2007.

potensial. Setiap gerakan protes (*protest movement*) tidak akan terjadi tanpa munculnya seseorang atau beberapa orang yang mampu memanipulasi atau mentransformasi keluhan massa ke dalam bentuk gerakan protes. Tentu saja, peranan semacam itu hanya bisa dilakukan setidak-tidaknya oleh lapisan menengah, seperti tokoh-tokoh agama, dalam komunitas tersebut. Gerakan tersebut bisa berwarna lunak seperti pergunjingan dan kecurigaan atau berwarna keras seperti pengrusakan rumah ibadah atau bahkan penganiayaan.⁶²

Dengan demikian, ada empat hal yang perlu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. *Pertama*, usaha pemahaman terhadap ajaran agama secara menyeluruh dan tepat, dan menghindarkan distorsi historis akibat pengalaman pahit di masa-masa yang lalu. Pemahaman seperti ini harus ditransformasikan ke dalam sikap massa. *Kedua*, usaha untuk menghindari penyalahgunaan agama untuk kepentingan “tertentu” dan pengaitan dengan faktor lain yang potensial menjadi sumber ketegangan, misalnya ketimpangan sosial. *Ketiga*, usaha untuk melakukan kerja sama dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan. *Keempat*, ialah usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada masing-masing umat, karena diharapkan pendidikan yang baik akan mengantarkan lahirnya masyarakat yang beradab, ramah, jujur, adil, manusiawi, berwawasan luas dan mampu berpikir rasional dan obyektif.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 5.